

**PENGARUH PENERAPAN PRAKTIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE, STRUKTUR
KEPEMILIKAN PUBLIK, FAKTOR REGULASI,
PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP PENGUNGKAPAN INFORMASI PERUSAHAAN
(Studi empiris pada perusahaan yang termasuk dalam kelompok
LQ 45 yang listing di Bursa Efek Indonesia)**

SKRIPSI

**Ditulis dan diajukan sebagai syarat untuk mengikuti
Ujian Oral Comprehensive Sarjana Lengkap Pada
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Suska Riau**



Oleh :

Nama : Ilham

No. Induk Mahasiswa : 10573002050

**JURUSAN AKUNTANSI S-1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASI RIAU
PEKANBARU
2009**

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN PRAKTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, STRUKTUR KEPEMILIKAN PUBLIK, FAKTOR REGULASI, PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN INFORMASI PERUSAHAAN

Oleh : Ilham

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan praktik good corporate governance yang dilihat dari proporsi komisaris independen, ukuran dewan direksi, keberadaan komite audit, serta struktur kepemilikan publik, faktor regulasi, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan informasi perusahaan. Pengungkapan informasi perusahaan diukur dengan menggunakan Annual Report Awards 2007, yaitu dengan metode scoring terhadap annual report perusahaan sampel pada penelitian ini. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang termasuk dalam kelompok perusahaan LQ45 secara berturut-turut pada tahun 2004, 2005, 2006, dan 2007.

Metode statistik yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proporsi komisaris independen dan (2) ukuran dewan direksi yang merupakan praktik penerapan GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil regresi parsial proporsi komisaris independen yaitu $p\text{-value } 0,758 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $0,310 < 2,000$. $P\text{-value}$ ukuran dewan direksi sebesar $0,127 > 0,05$ ($0,127 > 0,05$), serta t hitung sebesar $-1,547$ lebih kecil dari t tabel sebesar $2,000$ ($-1,547 < 2,000$). (3) Keberadaan komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi perusahaan yaitu dengan $p\text{-value}$ sebesar $0,029 < 0,05$, serta t hitung sebesar $2,230 > t$ tabel sebesar $2,000$. (4) Selain itu, struktur kepemilikan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi, yaitu dengan $p\text{-value}$ $0,251 > 0,05$, serta t hitung sebesar $1,158 < t$ tabel $2,000$. (5) faktor regulasi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi perusahaan, yaitu dengan $p\text{-value}$ sebesar $0,046$ ($0,046 < 0,05$), serta t hitung lebih sebesar $2,035 > t$ tabel sebesar $2,000$. (6) Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi perusahaan, yaitu dengan $p\text{-value}$ $0,042 < 0,05$ dan t hitung sebesar $2,074 > t$ tabel sebesar $2,000$ ($2,074 > 2,000$). (7) Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi, yaitu dengan $p\text{-value}$ sebesar $0,478 > 0,05$ serta nilai t hitung sebesar $0,714 < t$ tabel $2,000$.

Hasil regresi secara simultan menunjukkan bahwa Penerapan Praktik GCG, Struktur kepemilikan Publik, Faktor Regulasi, Profitabilitas, dan Ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi. Hal ini ditunjukkan oleh $p\text{-value}$ sebesar $0,000$ signifikan pada tingkat $0,05$ ($0,000 < 0,05$), dan nilai t hitung sebesar $5,771$ lebih besar dibandingkan dengan t tabel sebesar $2,167$ ($5,771 > 2,167$). Nilai Adjuster R square menunjukkan sebesar $33,3\%$ yang berarti bahwa variasi Proporsi komisaris independen, ukuran dewan direksi, keberadaan komite audit, struktur kepemilikan publik, faktor regulasi, dan ukuran perusahaan dapat menjelaskan variasi indeks pengungkapan sebesar $33,3\%$ dan sisanya sebesar $66,7\%$ dijelaskan oleh diluar variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.

Kata Kunci : *Corporate Governance, Struktur Kepemilikan Publik, Regulasi, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Indeks Pengungkapan*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	16
3. Tujuan Penelitian	16
4. Manfaat Penelitian	17
5. Sistematika Penulisan	18
BAB II TELAAH PUSTAKA	
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	19
2. Laporan Keuangan	21
A. Pengertian Laporan Keuangan	22
B. Tujuan Laporan Keuangan	22
C. Karakteristik Laporan Keuangan	24
D. Pihak-pihak yang memerlukan Laporan Keuangan	26
3. Pengungkapan Informasi	28
A. Pengertian Pengungkapan	28
B. Tujuan Pengungkapan	32
4. <i>Good Corporate Governance</i>	33
A. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	33
B. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	35
C. Manfaat Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	38
D. Organ Perusahaan dalam Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	39
5. Hubungan Praktik <i>Corporate Governance</i> , Struktur Kepemilikan Publik, Faktor regulasi, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Informasi	41
A. Komisaris Independen.....	42

B. Dewan Direks	46
C. Komite Audit	47
D. Struktur Kepemilikan Publik	49
E. Regulasi.....	51
F. Profitabilitas	51
G. Ukuran Perusahaan.....	52
6. Tinjauan Penelitian Terdahulu	54
7. Hipotesis Penelitian.....	55
8. Pandangan Islam tentang dasar pemerintahan yang dapat dikaitkan dengan tata kelola perusahaan yang baik	62

BAB III METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel	64
2. Jenis dan Sumber Data	65
3. Definisi Operasi dan Pengukuran Variabel.....	66
A. Variabel Dependen (Y).....	66
B. Variabel Independen (X)	67
a. Proporsi Komisaris Independen	67
b. Ukuran Dewan Direksi.....	67
c. Keberadaan Komite Audit	68
d. Struktur Kepemilikan Publik	68
e. Regulasi.....	68
f. Profitabilitas	68
g. Ukuran Perusahaan.....	69
4. Kerangka Skematis Model Penelitan	69
5. Metode Analisis dan Pengolahan Data	69
A. Analisis Statistik Deskriptif.....	70
B. Uji Normalitas Data.....	
C. Uji Asumsi Klasik	71
a. Uji Multikoleniaritas.....	71
b. Uji Autokolerasi.....	72
c. Uji Heteroskedastisitas	73
D. Pengujian Hipotesis	74
a. Uji Parsial (Uji t)	74
b. Uji Simultan (Uji f)	74
E. Koefisien Determinasi	75

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Statistik Deskriptif	76
2. Uji Normalitas Data	78
3. Uji Asumsi Klasik.....	80
A. Uji Multikoleniaritas	81
B. Uji Autokolerasi	82
C. Uji Heteroskedastisitas	82
4. Analisis Hasil Regresi.....	84
A. Hasil Uji Parsial (Uji t).....	85

B. Hasil Uji Simultan (Uji F).....	100
C. Koefisien Determinasi.....	101
 BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan	102
2. Keterbatasan Penelitian.....	107
3. Saran	107
 DAFTAR PUSTAKA	 109

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, setiap perusahaan dituntut untuk memberikan kinerja yang terbaik dalam kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut dibutuhkan tidak lain adalah untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja usaha tersebut, pihak manajemen berkewajiban memberikan informasi-informasi yang relevan dalam bentuk laporan atas hasil yang dicapainya dalam suatu periode kepada pemilik perusahaan. Hal tersebut juga merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pihak manajemen atas hasil yang dicapai dari pengelolaan dana yang diamanatkan kepadanya oleh pemilik perusahaan. Informasi atas hasil yang dicapai tersebut dilaporkan dalam laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang disusun setiap periode akuntansi perusahaan yang secara formal wajib dipublikasikan oleh perusahaan yang memungkinkan bagi pihak-pihak diluar manajemen untuk mengetahui kondisi perusahaan secara utuh dan keseluruhan.

Suatu hal yang akan muncul menjadi suatu permasalahan dalam pelaporan tersebut dan akan menjadi dilema dikalangan pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan perusahaan adalah permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan terhadap informasi perusahaan yang digunakan untuk suatu kepentingan dalam pengambilan keputusan tersebut. Permasalahan tersebut

merupakan suatu hal yang mempertanyakan tentang sejauh mana informasi yang diungkapkan dalam laporan tersebut.

Pengungkapan dalam laporan keuangan tersebut akan membantu pemilik perusahaan serta pengguna yang lainnya untuk memahami isi dan angka yang disajikan. Pemahaman yang didapat dari suatu laporan keuangan, dapat dijadikan alat atau pedoman untuk pertimbangan pengambilan keputusan yang berhubungan terhadap prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Sedangkan kegagalan dalam memahami laporan keuangan mengakibatkan beberapa perusahaan mengalami kesalahan penilaian (*misvalued*), baik *undervalued* maupun *overvalued*.

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi pengungkapan wajib (*mandatory disclosures*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosures*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Peraturan mengenai pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dikeluarkan oleh pemerintah yaitu melalui keputusan ketua Bapepam No. Kep-38/PM/1996. Peraturan ini berlaku bagi semua perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan publik.

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi yang diwajibkan. Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pembuat keputusan oleh para pemakai laporan tahunannya (Meek dkk, 1995). Menurut peraturan mengenai laporan tahunan yang

berlaku di Indonesia, pengungkapan sukarela semacam ini dimungkinkan selama tidak menyesatkan dan bertentangan dengan informasi yang disajikan dalam bagian lainnya.

Luas pengungkapan informasi antara perusahaan dalam industri satu dengan industri lainnya berbeda-beda. Perbedaan ini dipicu dari kandungan resiko pada masing-masing industri yang kompleks karena masing-masing industri memiliki karakteristik yang berbeda.. Hal ini akan berdampak terhadap perbedaan tingkat pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.

Menurut teori agensi (*agency theory*), penyebab timbulnya permasalahan terhadap transparansi pengungkapan informasi perusahaan dipengaruhi oleh konflik kepentingan yang terjadi antara pihak manajemen (agen) dengan pemilik perusahaan (principal). Permasalahan ini muncul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian dan pengungkapan informasi yang akan digunakan pemilik /principal untuk memberikan incentive pada pihak manajemen sekaligus untuk mengukur hasil yang dicapai oleh manajemen tersebut. Dalam hal ini, pemilik perusahaan memiliki tujuan yaitu untuk dapat menerima imbalan yang besar atas kinerja yang optimal serta efektif dan efisien yang dicapai oleh pengelola (manajemen). Sejalan dengan itu, pihak manajemenpun juga menginginkan bahwa pengelolaan atas dana yang mereka terima tersebut dapat mereka manfaatkan secara efektif dan efisien untuk kesempatan-kesempatan pertumbuhan laba perusahaan sehingga hasil yang mereka capai dapat seoptimal mungkin pada akhir periode atau pada

saat pelaporan hasil kinerja kepada pemilik perusahaan. Dalam hal ini, pihak manajemen mempunyai keinginan yang oportunis atas upaya yang mereka usahakan atas pengelolaan data tersebut, yaitu keinginan akan laba yang besar yang dapat meningkatkan incentive pemilik kepada mereka dengan asumsi bahwa mereka telah berhasil dalam menjalankan pengelolaan perusahaan dengan baik. Namun, tidak semua tujuan-tujuan tersebut dijalankan dengan baik oleh manajemen.

Selain itu, timbulnya masalah menurut teori agensi yaitu dengan asumsi dasar adalah bahwa para pekerja, khususnya pekerja kelas atas (*top management*, pada dasarnya selalu bertindak atas kepentingannya sendiri yang dikhawatirkan akan berdampak pada transparansinya, sehingga perlu dibuat sebuah mekanisme dimana para pekerja ini tunduk pada kepentingan pemilik modal (shareholder) untuk kepentingan pengambilan keputusan atas informasi yang transparansi kepadanya. Kepentingan sendiri ini akan lebih cenderung mempunyai perilaku untuk lebih menguntungkan pihaknya saja.

Banyak perusahaan-perusahaan yang secara nyata terbukti bahwa pengelolaan dana pemilik tersebut dipertanyakan transparansi pelaporannya. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan terjadinya tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen dalam upaya menutupi atau melakukan perataan terhadap pelaporan laba dengan tujuan memperlihatkan kinerja yang seolah-olah stabil atas tingkatan laba yang mereka capai tersebut.. Dengan melihat keadaan tersebut, ini akan menjadi hal yang sulit sekali bagi pihak investor dalam proses pengambilan keputusan atas laporan yang dipertanyakan akuntabilitas dan

transparansinya. Banyak investor yang kemudian tidak percaya, lalu mereka kebanyakan melepas saham perusahaan tersebut di pasar saham dengan harga yang murah, sehingga akan diketahui bahwa kinerja perusahaan tersebut tidak optimal karena permasalahan akuntabilitas dan kinerja perusahaan itu sendiri, serta juga tingkat pengungkapan yang diragukan kelengkapannya yang dapat membingungkan para investor dalam memutuskan keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan itu kembali. Dalam permasalahan ini, sangat dibutuhkanlah suatu tatanan yang terkendali secara baik atas penjaminan hak-hak pemegang saham tersebut agar mereka dapat dengan aman dalam berinvestasi pada perusahaan tersebut, serta dapat dengan mudah menerima informasi-informasi yang mereka butuhkan untuk hal pengambilan keputusan yang berhubungan dengan investasinya tersebut.

Seluruh struktur jabatan, dalam hal tanggung jawab dan wewenang dalam tata kelola perusahaan yang merupakan agen dalam konsep teori agensi, seperti dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit di dalam suatu perusahaan, diharuskan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing secara profesional untuk kepentingan akhir, yaitu dalam pelaporan informasi yang lengkap, dipertanggungjawabkan, dan mempunyai tingkat akurasi yang tinggi kepada pemilik/principal dan pihak-pihak yang membutuhkan lainnya untuk kepentingan pengambilan keputusan.

Dewan komisaris diharapkan dapat mengontrol dan mengawasi setiap kebijakan dan strategi yang dilaksanakan oleh direksi dalam proses pelaksanaan operasional perusahaan secara keseluruhan dengan baik. Begitu juga dengan

dewan direksi, mereka diharuskan untuk melaksanakan lebih ketat pengawasan dan penjaminan keberhasilan target yang jalankan oleh manajemen perusahaan secara langsung. Hal ini akan mendapat perhatian yang serius bagi komite audit. Mereka berkewajiban untuk melakukan pengawasan yang menyeluruh terhadap sistem akuntansi perusahaan, peningkatan etika bisnis, akuntabilitas, serta pengungkapan yang akurat dan tepat waktu dalam penyusunan laporan keuangan

Dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang baik oleh keseluruhan pihak tersebut, transparansi terhadap pelaporan akan tercipta lebih baik pula tingkat pengungkapannya kepada pemilik perusahaan dan pihak-pihak lain yang membutuhkannya, sehingga hal ini akan membuat pemilik perusahaan dan pengguna akhir lainnya dapat memahami dan mengetahui keadaan perusahaan secara keseluruhan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang akurat.

Hal lain yang membuat permasalahan adalah persepsi kedua belah pihak dalam menanggung resiko (Eisenhard, 1989 dalam Khomsiyah, 2003). Agen yang mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, tidak akan memberikan seluruh informasi atas kepemilikannya, tetapi dengan adanya pengawasan pemilik yang lebih ketat akan memaksa agen untuk memberikan atau mengungkapkan keseluruhan informasi mengenai kinerja agen (manajemen) tersebut.

Keinginan principal akan transparansi manajemen tersebut pada umumnya sangat sulit untuk dapat dipenuhi oleh pihak manajemen Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti: pertimbangan biaya penyajian informasi, keinginan manajemen menghindari risiko agar tidak terlihat kelemahannya, waktu yang

digunakan untuk menyajikan informasi yang relatif lama, dan sebagainya. Sehingga dengan hal yang demikian tersebut akan menghasilkan suatu produk ketiadaan harmonisasi antara agen dan principal ini yang disebut dengan ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) (Khomsiyah, 2003).

Biaya pengungkapan informasi dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu: biaya langsung dan biaya tidak langsung (Suripto, 1999). Biaya pengungkapan langsung adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berkaitan langsung dengan pengembangan dan penyajian informasi. Biaya-biaya ini meliputi biaya pengumpulan data, biaya pemrosesan informasi, biaya pengauditan, dan biaya penyebaran informasi. Biaya pengungkapan tidak langsung adalah biaya yang timbul akibat diungkapkan atau tidak diungkapkan informasi. Biaya ini meliputi biaya litigasi atau biaya hukum, biaya kerugian persaingan, dan biaya politik. Biaya litigasi timbul akibat pengungkapan yang tidak mencukupi atau pengungkapan informasi yang menyesatkan. Biaya kerugian persaingan/ kompetisi terjadi apabila informasi yang diungkapkan melemahkan daya saing perusahaan karena informasi tersebut digunakan oleh pesaing untuk memperkuat daya saing mereka. Biaya politik terjadi ketika politik pengungkapan perusahaan memicu regulasi pemerintah.

Salah satu bagian dari permasalahan transparansi tersebut merupakan permasalahan yang terajadi pada sisi keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Semakin tinggi tingkat keterbukaan atas

laporan keuangan perusahaan maka seharusnya semakin rendah pula kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Selain itu, Hal lain yang dapat mempengaruhi tingkat transparansi dalam laporan tahunan perusahaan adalah Profitabilitas. Profitabilitas yang dinilai dengan tolak ukur modal yaitu kemampuan modal yang dimiliki perusahaan untuk dapat menghasilkan laba. Jadi, hal ini mengukur kemampuan pihak manajemen perusahaan dalam memperoleh laba atas modal yang dikelolanya dari investasi para investor. Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan laporan keuangan tahunan kepada pemegang saham (Heinze, 1976). Tingkat profitabilitas yang tinggi mempunyai arti bahwa pihak manajemen telah berhasil dan dapat mengelola dana (modal) dari pemilik dengan baik sehingga mereka dapat menghasilkan laba yang baik pula atas pengelolaan dana tersebut. Hal ini pastinya membuat kecenderungan dan motivasi manajemen dalam melaporkan hasil yang dicapainya tersebut. Tingkat profitabilitas yang besar pastinya akan menarik minat para investor lain untuk bergabung pada perusahaan tersebut, dan atas tujuan ini pihak manajemen pastinya akan memaparkan seluruh informasi-informasi secara lengkap dalam laporan pertanggungjawabannya, sehingga hal tersebut dapat dikatakan akan mewujudkan suatu transparansi terhadap laporan tahunan (laporan keuangan) perusahaan.

Disamping itu, Belkaoui dan Karpik (1989), mengemukakan bahwa ukuran perusahaan merupakan hal yang diduga berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini dikaitkan

dengan teori agensi, dimana struktur kepemilikan publik juga menjadi berpengaruh terhadap transparansi informasi perusahaan. Perusahaan yang besar pada umumnya mempunyai struktur kepemilikan model manajerial, yaitu terdapat pemisahan antara pemilik dan pengelola perusahaan. Dalam struktur pada perusahaan besar ini, seluruh dana yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dikelola sepenuhnya oleh pihak-pihak yang dianggap profesional dibidangnya masing-masing. Dalam hal ini, pemilik dana dikategorikan menjadi dua, yaitu pemilik dana dengan modal yang besar (*blockholder*) pemilik dana dengan modal yang kecil (ritel). Pemilik modal kecil tersebut dapat juga disebut dengan kepemilikan modal perusahaan atas publik diluar perusahaan tersebut. Pemilik modal yang besar mempunyai kemampuan tawar menawar yang kuat, sementara pemilik modal individual (publik) cenderung memiliki posisi lemah dalam menyuarakan kepentingan. Namun, kepemilikan publik ini akan menjadi kuat dan berpengaruh terhadap hak-hak dalam informasi yang mereka peroleh dalam pelaporan manajemen karena perlindungan kepentingan atas pemegang saham minoritas yang diberikan oleh Komisaris Independen perusahaan. Jadi, dengan adanya Dewan komisaris Independen dalam perusahaan, hak-hak atas suara dan informasi dalam pengambilan keputusan bagi pemegang saham dalam hal kepemilikan publik ini dapat dijamin dan yang utama adalah dapat membuat pihak manajemen memperhatikan pengungkapan secara transparansi atas informasi kinerja mereka pada suatu periode.

Dalam hal ukuran perusahaan, perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung mendapat pengawasan dari masyarakat dan memiliki *public demand*

akan informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga akan mengungkapkan lebih banyak informasi. Selain itu, perusahaan besar pastinya memiliki biaya keagenan yang lebih besar karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan dana tersebut. Namun hal ini tentunya akan membuat manajemen menjadi sasaran atas biaya yang dikeluarkan untuk pengawasan kinerjanya yang dilihat pengurangan laba yang pada suatu periode akibat munculnya biaya pengawasan tersebut, sehingga mereka akan mengungkapkan informasi yang lebih sedikit untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Selain itu, perusahaan besar diduga tingkat transparansi atas pelaporan informasi kinerjanya tersebut adalah sangat baik. Hal ini diprediksi dengan asumsi bahwa perusahaan besar memiliki sumberdaya-sumberdaya yang potensial dalam bidangnya masing-masing dalam mengelola jumlah aset yang besar sehingga akan berdampak pada kinerja perusahaan, dan dengan hal ini tentunya tindakan pihak manajemen akan cenderung berdampak pada pelaporan hasil kinerja tersebut, yaitu dengan mengungkapkan informasi yang rinci atau dengan tingkat transparansi yang baik demi rasa tanggungjawabnya dan keberhasilan yang dicapainya pada periode tersebut.

Disamping itu, faktor regulasi juga diduga sebagai hal yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dan tahunan perusahaan. Beberapa literatur juga telah menemukan bahwa faktor regulasi mempunyai peran dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik demi terciptanya transparansi informasi. Pernyataan ini diasumsikan perusahaan yang melaksanakan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah secara baik, akan

berupaya untuk meningkatkan pengungkapan informasi dalam pelaporannya. Regulasi dapat berdampak pada struktur pengelolaan perusahaan karena adanya pengawasan dan tuntutan yang lebih ketat. Black dkk (2003) menyatakan bahwa perbankan adalah industri yang dikenai regulasi yang ketat dalam kaitannya dengan penerapan *corporate governance*. Selain perbankan, perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN) juga mendapatkan perhatian utama dalam transparansi di Indonesia.

Banyak paradigma yang berbeda dari pengelolaan perusahaan di belahan dunia Timur dan Barat, yang mencerminkan perbedaan budaya, praktik usaha dan perkembangan kelembagaan. Pada umumnya, yang dimaksud dengan pengelolaan perusahaan adalah hubungan antara pemilik perusahaan dengan *stakeholders* di satu sisi dan dewan direksi dan manajer di sisi yang lain. Khususnya, hal tersebut difokuskan pada tanggung jawab dari dewan direksi kepada setiap *stakeholder* perusahaan. Salah satu tujuan dari pengelolaan perusahaan adalah membuat suatu keseimbangan dan pengawasan sistem untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber – sumber *corporate* dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pengambilan resiko yang tepat dan kelangsungan hidup (*sustainability*) sehingga dapat mewujudkan pelaporan informasi dengan tingkat transparansi yang luas terhadap output yang dihasilkan oleh perusahaan.

Hubungan antara perusahaan negara (*corporation*) dan *stakeholder* mengalami perubahan yang signifikan di Asia, terutama terhadap krisis ekonomi. Para investor dan peminjam menginginkan peningkatan standar dari pengelolaan perusahaan di perusahaan dimana mereka berinvestasi atau meminjam, untuk

melindungi keuntungan mereka dalam keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, amatlah penting memperkuat praktek-praktek pengelolaan perusahaan dalam basis yang terus menerus.

Petunjuk yang jelas dan syarat-syarat untuk perlindungan investor serta penyingkapan informasi telah dimasukkan dalam wilayah tersebut. Di Thailand, perusahaan-perusahaan membuat jaminan penawaran umum (*public offering of securities*) dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar harus memiliki paling sedikit dua direktur independen dalam dewan pengurusnya untuk memperkuat kepercayaan dan melindungi kepentingan dari pemilik saham minoritas. Di Indonesia, untuk mempromosikan transparansi, perusahaan-perusahaan yang terdaftar diharuskan meyerahkan laporan keuangan setiap tiga bulan, enam bulan dan menyerahkan laporan tahunan kepada pihak yang berwenang (*regulatory authorities*) dengan maksud untuk memberitahukan kepada mereka setiap kejadian penting dalam kurun waktu yang singkat. Dengan melihat keadaan tersebut, suatu hal dibutuhkan di seluruh Asia adalah meningkatkan kesadaran akan betapa pentingnya pengelolaan perusahaan dan menimbulkan keinginan serta semangat menjalankan pengelolaan perusahaan yang baik.

Sulit dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah *Good Corporate Governance* (GCG) kian populer. Tak hanya populer, tetapi istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Hal itu setidaknya terwujud dalam suatu keyakinan, yaitu GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu

berkembang sekaligus menjadi terbuka. Dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan dan mengintroduksi konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat (Sulistyanto & Lidyah, 2002). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholders*) dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya.

Penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) menyimpulkan penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, adalah (1) mekanisme pengawasan dewan komisaris (*board of director*) dan komite audit (*audit committee*) suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan (2) pengelolaan perusahaan yang belum profesional. Sehingga penerapan konsep GCG di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders*.

Dengan melihat hal tersebut, sangat relevan bila ditarik suatu pernyataan terhadap efektivitas penerapan *Good Corporate Governance*. Mekanismenya merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan dalam pengungkapan transparansi informasi. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni, Khomsiyah dan Rika, 2004).

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value*

added) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (YPPMI & SC, 2002).

Good Corporate Governance itu sendiri memiliki beberapa aspek penting yang harus diperhitungkan oleh kalangan bisnis. Aspek-aspek ini diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan yang menjadi momok dalam perusahaan. Aspek-aspek tersebut yaitu berupa: (1) adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi, (2) adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*, (3) adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan, kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya, serta (3) adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*) (www.madani-ri.com).

Beberapa penelitian yang secara khusus menguji hubungan antara struktur *Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi telah dilakukan oleh Forker (1992), Ho dan Wong (2000), dan Sabeni (2002) dalam Khomsiyah (2003).

Pentingnya penelitian mengenai *Corporate Governance* dan pengungkapan informasi dapat ditinjau dari dua perspektif. Penelitian dilakukan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *Corporate Governance*, mengingat pentingnya peran *Corporate Governance* dalam struktur pengelolaan bisnis dan ekonomi moderen yang ditopang oleh pasar modal dan pasar uang (Witherell, 2000; Oman, 2001 dalam Khomsiyah, 2003), meningkatkan kepercayaan publik pada perusahaan (Brayshaw, 2002 dalam Khomsiyah, 2003).

Penelitian Ho dan Wong (2000) dalam Khomsiyah (2003) menunjukkan bahwa Indonesia, Thailand dan Jepang yang mempunyai tingkat transparansi yang rendah, merupakan negara yang mengalami *volatile shocks* yang lebih besar dibandingkan dengan negara yang mempunyai transparansi yang lebih tinggi (Hongkong, Singapura dan Taiwan).

Penelitian yang dilakukan Khomsiyah (2003) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan *Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan. Semakin tinggi indeks implementasi *Corporate Governance*, semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul “ **“PENGARUH PENERAPAN PRAKTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, STRUKTUR KEPEMILIKAN PUBLIK, FAKTOR REGULASI, PROFITABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN INFORMASI PERUSAHAAN“** (Studi empiris pada perusahaan yang termasuk dalam kelompok perusahaan LQ 45 yang listing di Bursa Efek Indonesia).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga bahwa penerapan praktik-praktik *Corporate Governance* melalui Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, serta Keberadaan Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan di Indonesia.
2. Diduga bahwa Struktur Kepemilikan Publik, faktor regulasi, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan di Indonesia.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Informasi perusahaan.
2. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.
3. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh Keberadaan Komite Audit perusahaan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.
4. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh Struktur Kepemilikan Publik terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.
5. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh Faktor Regulasi terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.

6. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.
7. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.

4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh implementasi *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia.

2. Bagi Investor

Membantu memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan atas pengungkapan informasi dengan melihat penerapan *Good Corporate Governance* sehingga dapat mengambil keputusan investasi yang tepat.

3. Bagi Manajemen Perusahaan

Membantu memberikan gambaran serta saran tentang kinerja perusahaan dalam proses pengembangan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) demi terciptanya transparansi dalam pelaporan keuangan dan Pengambilan keputusan.

5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini memuat tentang landasan-landasan teori mengenai mekanisme *corporate governance* dan pengungkapan informasi, penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian serta analisis data dan pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif teori agensi digunakan merupakan dasar yang digunakan guna memahami isu *Corporate Governanace* (Fama and Jensen, 1983 dalam Dr. A. Prasetyantoko, 2008). Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan antara *principal* dan agen. Laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan laporan keuangan yang dilaporkan oleh agen sebagai pertanggung jawaban kinerjanya, *principal* dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana agen tersebut bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya dan serta sebagai dasar pemberian kompensasi kepada agen.

Timbulnya permasalahan terhadap transparansi dalam laporan keuangan dapat dijelaskan dengan teori agensi. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan kinerjanya. Mereka harus dapat mengupayakan dana yang diserahkan pemilik pada mereka secara efektif dan efisien untuk menghasilkan laba yang proposional. Dengan kata lain, pihak pengelola harus dapat memenuhi hak-hak investor secara keseluruhan dengan baik dalam hal analisis pelaporan hasil kinerja dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat pada perusahaan. Hak-hak tersebut dapat terpenuhi apabila informasi-informasi yang diberikan oleh pengelola relevan dengan kinerjanya pada satu

periode tersebut serta menungkapkan keseluruhan informasi-informasi yang terjadi dan yang menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Disamping itu, manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Mereka dituntut untuk memberikan informasi yang luas dalam bentuk suatu laporan yang riil atas kegiatan pengelolaan dana pemilik selama satu periode. Namun, Keinginan principal tersebut pada umumnya sangat sulit untuk dapat dipenuhi oleh pihak manajemen. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti: pertimbangan biaya penyajian informasi, keinginan manajemen menghindari risiko agar tidak terlihat kelemahannya, waktu yang digunakan untuk menyajikan informasi yang relatif lama, dan sebagainya.

Menurut Einsenhardt, 1989 (Deni Darmawati dkk; 2005) Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan, yaitu :

1. Masalah keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen. Permasalahannya adalah bahwa prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat.
2. Masalah pembagian resiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko. Dengan demikian, prinsipal dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda yang dikarenakan adanya perbedaan persepsi terhadap resiko.

Dengan melihat permasalahan tersebut, *Corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa

mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer. Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) yang dapat menciptakan transparansi pelaporan.

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan gambaran dari keseluruhan aktifitas perusahaan yang terjadi pada satu periode akuntansi, yang dapat digunakan oleh pihak yang memerlukan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan. Laporan keuangan juga dapat diindikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik terhadap kinerja dan hasil yang diraih perusahaan dalam mencapai tujuan.

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

A. Pengertian Laporan Keuangan

Adapun laporan keuangan menurut Erich A. Helfert adalah (www.bapepam.go.id) :

Seperangkat laporan yang biasanya terdiri dari neraca untuk periode tertentu, laporan operasi untuk periode tertentu, dan laporan arus dana untuk periode yang sama, ditambah dengan laporan khusus yang menjelaskan perubahan ekuitas kepemilikan pada neraca.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2007), pengertian laporan keuangan didefinisikan sebagai berikut :

Laporan keuangan merupakan bagian proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana). Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang mempunyai bagian integral dari laporan keuangan.

B. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Adapun tujuan laporan keuangan yang tercantum dalam Standard Akuntansi Keuangan (2002, 4) adalah :

“Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai, namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam

pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu.

Tujuan laporan keuangan yang dinyatakan dalam APB Statement No. 4 dalam Belkaoui (2000:126) dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan lain dalam posisi keuangan.
2. Tujuan umum laporan keuangan adalah:
 1. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban suatu usaha bisnis dengan tujuan untuk:
 - 1) Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan.
 - 2) Menunjukkan pendanaan dan investasi.
 - 3) Mengevaluasi kemampuan perusahaan memenuhi komitmen.
 - 4) Menunjukkan basis sumber daya untuk perusahaan.
 2. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan sumber daya bersih sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang menghasilkan profit dengan tujuan untuk:
 - 1) Menunjukkan tingkat kembalian deviden harapan bagi investor.
 - 2) Menunjukkan kemampuan operasi untuk membayar kreditur dan pemasok, menyediakan pekerjaan bagi karyawan, membayar pajak dan penghasilan dana untuk ekspansi.
 - 3) Menyediakan informasi bagi manajemen untuk perencanaan dan pengendalian
 3. Menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi laba potensial dimasa yang akan datang.
 4. Menyediakan informasi lain yang dibutuhkan tentang perubahan sumber daya ekonomi dan kewajiban.
 5. Mengungkapkan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan pemakai.
3. Tujuan kualitatif akuntansi keuangan adalah sebagai berikut;
 1. Relevan, memilih informasi yang paling mungkin untuk membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi.
 2. Dapat dipahami, berarti selain jelas informasi yang dipilih juga harus dapat dipahami pemakai.
 3. Dapat diuji kebenarannya, berarti hasil-hasil akuntansi dibenarkan oleh ukuran-ukuran independen, menggunakan metode pengukuran yang sama.
 4. Netral, berarti informasi akuntansi diarahkan pada kebutuhan khusus pemakai tertentu.
 5. Tepat waktu, berarti mengkomunikasikan informasi seawal mungkin untuk menghindari keterlambatan pembuatan keputusan ekonomi.

6. Dapat diperbandingkan, perbedaan-perbedaan seharusnya tidak mengakibatkan perlakuan akuntansi yang berbeda.
7. Kelengkapan, semua informasi yang memenuhi persyaratan tujuan-tujuan kualitatif yang lain harus dilaporkan.

C. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Objektivitas laporan keuangan berfokus pada pemberian informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya dalam membuat keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif memberikan satu dasar pemilihan antara berbagai alternatif pelaporan dan akuntansi, seperti alternatif metode penyusutan, alternatif metode penilaian harta, dan alternatif metode penjelasan. Karakteristik kualitatif juga membantu menjawab pertanyaan tentang karakteristik informasi akuntansi apa yang membuat informasi bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Suatu laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan (www.bapepam.go.id).

Menurut Statement of Financial Accounting (SFAC) No. 2 karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Relevan maksudnya adalah kapasitas informasi yang dapat mendorong suatu keputusan apabila dimanfaatkan oleh pemakai untuk kepentingan memprediksi hasil di masa depan yang berdasarkan kejadian waktu lalu dan sekarang. Ada tiga karakteristik utama yaitu:

- a. Ketepatan waktu (*timeliness*), yaitu informasi yang siap digunakan para pemakai sebelum kehilangan makna dan kapasitas dalam pengambilan keputusan;
 - b. Nilai prediktif (*predictive value*), yaitu informasi dapat membantu pemakai dalam membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian yang lalu, sekarang dan masa depan;
 - c. Umpan balik (*feedback value*), yaitu kualitas informasi yang memungkinkan pemakai dapat mengkonfirmasi ekspektasinya yang telah terjadi di masa lalu.
2. *Reliable*, maksudnya adalah kualitas informasi yang dijamin bebas dari kesalahan dan penyimpangan atau bias serta telah dinilai dan disajikan secara layak sesuai dengan tujuannya. *Reliable* mempunyai tiga karakteristik utama, yaitu:
- a. Dapat diperiksa (*verifiability*), yaitu konsensus dalam pilihan pengukuran akuntansi yang dapat dinilai melalui kemampuannya untuk meyakinkan bahwa apakah informasi yang disajikan berdasarkan metode tertentu memberikan hasil yang sama apabila diverifikasi dengan metode yang sama oleh pihak independen;
 - b. Kejujuran penyajian (*representation faithfulness*), yaitu adanya kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi serta sumber-sumbernya;
 - c. Netralitas (*neutrality*), informasi akuntansi yang netral diperuntukkan bagi kebutuhan umum para pemakai dan terlepas

dari anggapan mengenai kebutuhan tertentu dan keinginan tertentu para pemakai khusus informasi.

3. Daya Banding (*comparability*), informasi akuntansi yang dapat dibandingkan menyajikan kesamaan dan perbedaan yang timbul dari kesamaan dasar dan perbedaan dasar dalam perusahaan dan transaksinya, dan tidak semata-mata dari perbedaan perlakuan akuntansinya.
4. Konsistensi (*consistency*), yaitu keseragaman dalam penetapan kebijaksanaan dan prosedur akuntansi yang tidak berubah dari periode ke periode (www.stekpi.ac.id).

D. Pihak-Pihak Yang Memerlukan laporan Keuangan

Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Beberapa kebutuhan ini meliputi (IAI, 1999) :

a. Investor.

Penanam modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.

b. Karyawan.

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.

c. Pemberi pinjaman.

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

d. Pemasok dan kreditor usaha lainnya.

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan pada tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

e. Pelanggan.

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan.

f. Pemerintah.

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

3. Pengungkapan Informasi

A. Pengertian pengungkapan

Pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan dan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Informasi yang diungkapkan tersebut merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor dan calon investor untuk pengambilan keputusan. Pihak pemakai memerlukan berbagai informasi yang relevan dan bermanfaat untuk keputusan investasi, kredit, dan sebagainya. Adanya informasi yang lengkap, akurat serta tepat waktu memungkinkan investor untuk melakukan pengambilan keputusan secara rasional sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Informasi keuangan yang dapat dilayani oleh pelaporan keuangan (*financial reporting*) hanya merupakan sebagian jenis informasi yang diperlukan oleh investor dan kreditor.

Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang

dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang pengungkapan adalah keputusan Bapepam No. Kep-38/PM/1996. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosures*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosures*).

Pengertian Pengungkapan Sukarela menurut Meek dkk. (1995) adalah sebagai berikut :

”Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lain yang relevan untuk pembuatan keputusan para pemakai laporan tahunan. Karena perusahaan memiliki keleluasan dalam melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan sehingga menimbulkan adanya keragaman atau variasi luas pengungkapan sukarela antar perusahaan.”

Pengungkapan Sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Sedangkan dari sumber PSAK dapat disimpulkan bahwa informasi lain atau informasi tambahan (telaahan keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja perusahaan, posisi keuangan perusahaan, kondisi ketidakpastian, laporan mengenai lingkungan hidup, laporan nilai tambah) adalah merupakan pengungkapan yang dianjurkan (tidak diharuskan) dan diperlukan dalam rangka memberikan penyajian yang wajar dan relevan dengan kebutuhan pemakai.

FASB mengidentifikasi lingkup (*scope*) informasi yang dipandang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit sebagai berikut (Suwardjono, 2005) :

1. Statement keuangan (*financial statement*)
2. Catatan atas statement keuangan (*notes to financial statement*)
3. Informasi pelengkap (*supplementary information*)
4. Sarana pelaporan keuangan lain (*other means of financial reporting*)
5. Informasi lain (*other information*)

Komponen 1 dan 2 merupakan satu kesatuan yang disebut *basic financial statement* yang merupakan produk atau hasil dari apa yang oleh Paton dan Littleton (1970) dalam Suwardjono (2005) disebut rerangka atau struktur akuntansi pokok (*basic accounting structure*). Pelaporan keuangan mencakup semua informasi yang dapat disediakan manajemen yaitu komponen 1 sampai dengan 4. Walaupun dapat disediakan oleh manajemen, pengungkapannya tidak selalu dapat diwajibkan (*mandatory*) oleh penyusun standar akuntansi atau oleh badan pengawas (seperti SEC) melalui peraturan-peraturannya. Penyusun standar (FASB / IAI) dapat mewajibkan pengungkapan untuk komponen 1 sampai 3 dan untuk komponen 3 tingkat wajibnya hanya sampai pada batas sangat merekomendasi (*strongly recommend*). Jadi secara praktis, pengungkapan wajib melalui standar akuntansi hanya diberlakukan untuk komponen 1, 2 dan dalam kondisi tertentu komponen 3 (Suwardjono, 2005). Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian

informasi dalam bentuk seperangkat penuh *statement* keuangan. Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) mengartikan pengungkapan sebagai berikut :

Disclosure means supplying information in the financial statement, including the statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosures associated with the statements. It does not extend to public or private statement made by management or information provided outside the financial statement.

Evans (Suwardjono, 2005) membatasi pengertian pengungkapan hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan. Pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media masa lain serta informasi di luar lingkup pelaporan keuangan tidak masuk dalam pengertian pengungkapan. Pengungkapan sering juga dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk *statement* keuangan formal.

Evans (Suwardjono 2005) mengidentifikasi tiga tingkat pengungkapan yaitu memadai (*adequate disclosure*), wajar atau etis (*fair or ethical disclosure*), dan penuh (*full disclosure*). Tingkat ini mempunyai implikasi terhadap apa yang harus diungkapkan. Tingkat memadai adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar *statement* keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang terarah. Tingkat wajar adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama. Artinya, tidak ada satu pihakpun yang kurang mendapat informasi sehingga mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan posisinya. Dengan kata lain, tidak ada preferensi dalam pengungkapan informasi. Tingkat penuh menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan.

Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Pengungkapan dalam lingkup 1 sampai 3 adalah pengungkapan wajib dan sisanya sebagai sukarela (Suwardjono, 2005).

B. Tujuan Pengungkapan Informasi

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda (Suwardjono, 2005), diantaranya :

1. Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statement keuangan. Tujuan melindungi biasanya menjadi pertimbangan badan pengawas yang mendapat otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap pasar modal seperti SEC atau BAPEPAM.

2. Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihannya tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu

keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Tujuan ini biasanya melandasi penyusunan standar akuntansi untuk menentukan tingkat pengungkapan.

3. Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

4. *Good Corporate Governance*

A. Pengertian *Good Corporate Governance*

Corporate Governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji oleh pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik *Corporate Governance* terus berevolusi dari waktu ke waktu. Kajian atas *Corporate Governance* mulai disinggung pertama kalinya oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (*ownership*) dan kontrol.

Istilah *Corporate* untuk pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang sangat menentukan bagi praktik *Corporate Governance* di seluruh dunia.

Komite Cadbury mendefinisikan *Corporate Governance* (I Nyoman Tjager dalam Deny, 2005) sebagai :

Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* (Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006) adalah :

Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan etika.

Organization for Economic Cooperation and Development (OCED) mendefinisikan *Corporate Governance* (Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006) sebagai :

Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Corporate Governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan, dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya yang lebih efisien.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan:

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para *stakeholder* lainnya.
2. Suatu sistem yang dapat mendukung kelangsungan hidup perusahaan yang berkesinambungan akibat didorongnya kinerja terhadap sumber-sumber perusahaan secara efisien.
3. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
4. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya (www.madani-ri.com).
5. Suatu sistem yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri.

B. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Seiring dengan tumbuhnya perekonomian global, tumbuh pula kesadaran untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip *Corporate Governance*, dan hal ini tidak terbatas bagi pasar-pasar yang sedang tumbuh (*emerging markets*) atau perekonomian yang dalam proses transisi. Semua negara kini berkepentingan untuk memperbaiki cara perusahaan-perusahaan mereka bekerja. Perekonomian

yang paling maju sekalipun kini tengah membahas, mempertanyakan, dan mengupayakan praktik-praktik “ *governance* “ yang lebih baik.

Dalam konteks tumbuhnya kesadaran akan arti penting *Corporate Governance* ini, pada april 1998, *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) telah mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan keadaan, budaya dan tradisi masing-masing negara.

Adapun prinsip- prinsip *corporate governance* menurut OECD yang dikutip dalam Sutojo dan Alridge (2005:9) adalah:

- a. Perlindungan terhadap pemegang saham.
Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak pemegang saham. Hak-hak dasar pemegang saham meliputi hak-hak sebagai berikut :
 - a. Menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan
 - b. Mengalihkan atau memindahkan saham yang dimiliki
 - c. Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur
 - d. Ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS
 - e. Memilih anggota dewan komisaris dan direksi
 - f. Memperoleh pembagian keuntungan perusahaan
- b. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham
Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini mensyaratkan adanya perlakuan yang sama terhadap saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktek *insider traning* dan *self dealing* dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung *conflict of interest*.
- c. Peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan
Kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* seperti yang ditentukan dalam undang-undang dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan

dengan *stakeholders* dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja dan kesinambungan usaha.

d. Ketebukaan dan transparansi

Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat dan akurat untuk setiap permasalahan yang terkait dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Disamping itu informasi yang di ungkapkan harus disusun, di audit dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga harus meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

e. Akuntabilitas dewan komisaris (*boards of directors*)

Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) menjabarkan

prinsip-prinsip dari *good corporate governance* itu sebagai berikut:

a. *Fairness*

Laporan Keuangan dikatakan wajar apabila memperoleh opini atau pendapat wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik. Laporan keuangan yang wajar berarti tidak mengandung salah saji material, disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b. *Accountability*

Merupakan tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif dengan dibentuknya komite audit. Akuntabilitas juga berkaitan dengan pertanggungjawaban BOC dan BOD atas keputusan manajerial dan hasil kinerja usaha yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola perusahaan.

c. *Transparancy*

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan, yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang di sampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung pada kualitas penyajian informasi yang disampaikan perusahaan.

Prinsip ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian yang lengkap atas semua informasi yang dimiliki perusahaan.

d. *Responsibility*

Prinsip ini berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat dan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku.

Prinsip-prinsip ini diharapkan menjadi titik rujukan bagi para regulator (pemerintah) dalam membangun *framework* bagi penerapan *Corporate Governance*. Bagi para pelaku usaha dan pasar modal prinsip-prinsip ini dapat menjadi *guidance* atau pedoman dalam mengolaborasi *best practices* bagi peningkatan nilai (*valuation*) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan.

C. Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Manfaat yang dapat diperoleh dengan melaksanakan *good corporate governance* (FCGI, 2001) antara lain:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang tidak rigid karena faktor kepercayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan deviden. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

Di samping hal-hal tersebut di atas, GCG juga dapat:

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang

diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan (www.madani-ri.com).

Manfaat GCG ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global.

D. Organ Perusahaan Dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Organ perusahaan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai ketentuan

yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan (dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance*).

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanamkan dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang.

2. Dewan Komisaris dan Direksi

Kepengurusan Perusahaan Terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two-board system*) yaitu Dewan komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan peundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang.

3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian,

Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *Primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

4. Direksi

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

5. **Hubungan Praktik Corporate Governance, Struktur Kepemilikan Publik, Faktor Regulasi, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Informasi**

Salah satu aspek yang mempengaruhi rendahnya tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan (*annual report*) perusahaan adalah penerapan praktik good corporate governance yang tidak baik dalam perusahaan. Penerapan corporate governance dapat ditingkatkan melalui mekanisme internal dan eksternal perusahaan. Mekanisme internal meliputi Struktur dewan komisaris, kepemilikan institusional dan manajerial, serta kompensasi eksekutif.

Disamping itu, regulasi juga mempunyai peranan yang penting dalam pengungkapan informasi perusahaan. Regulasi akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan kandungan informasi dalam laporan keuangan dan laporan tahunan. Regulasi dapat berdampak pada struktur pengelolaan perusahaan karena adanya pengawasan yang lebih ketat. Black dkk. (2003) menyatakan

bahwa perbankan adalah industri yang dikenai regulasi yang ketat dalam kaitannya dengan penerapan *corporate governance*. Selain perbankan, perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN) juga mendapatkan perhatian utama dalam transparansi di Indonesia.

Profitabilitas adalah suatu hal yang mempengaruhi tingkat pengungkapan tersebut. Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya. Profit yang besar membuat kecenderungan kandungan informasi yang dilaporkan juga meningkat.

Ukuran perusahaan juga mempengaruhi pengungkapan informasi. Perusahaan yang dianggap besar, kualitas informasi yang dilaporkan akan cenderung banyak. Hal ini juga dengan sebanding dengan *cost* yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dalam proses transparansi informasinya.

A. Komisaris Independen

Seharusnya ada definisi yang jelas tentang komisaris "ekstern" atau komisaris "independen". Dalam hubungan ini, FCGI (www.cic-fcgi.org) mengusulkan agar dipergunakan definisi yang diterima dalam lingkup internasional yaitu komisaris "ekstern" atau "independen". Kriteria Komisaris Independen diambil oleh FCGI dari kriteria otoritas bursa efek Australia tentang Outside Directors. Kriteria untuk *Outside Directors* dalam *One Tier System* tersebut telah diterjemahkan menjadi kriteria untuk Komisaris Independen dalam

position paper FCGI kepada NCCG. Kriteria tentang Komisaris Independen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen.
2. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan;
3. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
4. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
5. Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
6. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.

7. Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

Untuk menerapkan GCG, langkah pertama dan utama adalah adanya dewan komisaris yang berperan aktif, independent, dan konstruktif. Dewan komisaris dalam suatu perusahaan berperan untuk memonitor setiap implementasi dari kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan mengurangi permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham, salah satunya adalah permasalahan menyangkut transparansi dalam pelaporan. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Menurut Egon Zehnder, Dewan Komisaris merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan (*annual report*). Pada intinya, Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan

daya saing perusahaan sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan (Egon Zehnder International, 2000 hal.12-13).

Lebih lanjut tugas-tugas utama Dewan Komisaris meliputi:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset;
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota Dewan Direksi yang transparan dan adil;
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan;
4. Memonitor pelaksanaan Governance, dan mengadakan perubahan di mana perlu;
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.(OECD Principles of Corporate Governance)

Keberadaan komisaris independen diatur dalam ketentuan Peraturan

Pencatatan Efek Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor 1-A yang berlaku sejak tanggal

1 juli 2000. Dalam peraturan tersebut dinyatakan:

“Perusahaan yang tercatat di BEJ wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya secara proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.”

Perseroan menyadari pentingnya keberadaan komisaris independen yang

bukan representasi pemegang saham perseroan. Perseroan menetapkan kriteria

komisaris independen sebagai berikut (YPPMI, 2002) :

- a. Tidak memiliki keterkaitan finansial baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada perseroan dan afiliasinya

- b. Tidak bekerja pada pemerintah termasuk departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir
- c. Tidak menjabat sebagai direksi di perseroan yang terafiliasi dengan perseroan
- d. Tidak bekerja di perseroan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir
- e. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan anggota komisaris independen untuk bertindak atau berpikir secara bebas.

B. Dewan Direksi

Board of Director merupakan suatu badan yang sangat penting dalam perusahaan. Hal ini dapat diibaratkan sebagai jantung dalam perusahaan. Agar perusahaan yang bersangkutan sehat, *Board of Director* juga harus sehat. *Board of Director* harus dapat memenuhi tanggung jawab dan menjalankan tugas-tugas mereka secara efektif dan efisien.

Direksi memiliki peranan penting dalam pengurusan dan pencapaian kinerja perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi dan menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana-rencana dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Keberadaan dewan direksi ini akan berpengaruh terhadap transparansi kinerja yang dilaporkan dalam laporan keuangan (*annual report*), sebab penjaminan tanggungjawab akan tugas-tugas serta pelaksanaan kegiatan manajemen akan selalu diawasi dan dimonitor secara berkala, dan hasil dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan tersebut. Salah satu tugas penting dari direksi adalah mengawasi dan memonitor manajer.

Adapun tanggung jawab *Board of Director* (Sutojo dan Aldridge, 2005:109) adalah:

- a. Menyusun dan mengarahkan strategi bisnis perusahaan.
- b. Memonitor kinerja manajemen perusahaan.
- c. Menjamin keseimbangan kepentingan semua pihak yang terkait dalam perusahaan.
- d. Menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak yang terkait dalam perusahaan.
- e. Menjaga perusahaan agar selalu mematuhi undang-undang/ketentuan hukum yang berlaku.

Sedangkan tugas-tugas *Board of Director* (Sutojo dan Aldridge, 2005:110) adalah:

- a. Membangun budaya perusahaan beretika tinggi.
- b. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran kerja tahunan.
- c. Mengevaluasi hasil penerapan strategi bisnis, hasil rencana usaha bisnis dan kinerja manajemen.
- d. Mengawasi penggunaan dana dalam jumlah yang besar.
- e. Mengawasi kinerja auditor internal dan eksternal.
- f. Mengawasi kegiatan perusahaan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- g. Mengevaluasi kinerja CEO

Dewan direksi juga menetapkan suatu sistem pengawasan internal yang efektif dengan tujuan untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Terkait dengan pengawasan internal yang dilakukan direksi tersebut, diharapkan dapat mengendalikan tindakan manajemen. Khususnya dalam menyusun laporan keuangan sehingga transparansi dalam laporan keuangan tersebut dapat terwujud dengan baik

C. Komite Audit

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan dan pengendalian internal dalam pengelolaan perusahaan. Sistem pengendalian internal merupakan bagian dari praktik GCG. Tugas komite audit mencakup

pengawasan yang memadai, etika bisnis, independensi, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan perusahaan, serta mekanisme untuk memastikan adanya tindak lanjut yang seksama jika terjadi pelanggaran dalam perusahaan.

Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Penilaian penginformasian yang dilakukan komite audit terhadap item-item yang diungkapkan pihak manajemen dalam laporan keuangan (*annual report*) tentunya mendorong manajemen untuk lebih memperhatikan transparansi terhadap informasi yang dilaporkan tersebut, karena informasi tersebut pastinya akan digunakan oleh para investor untuk pertimbangan investasinya.

Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri sekurang-kurangnya dari tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua.

Alijoyo (2002) menyebutkan bahwa anggota komite audit harus memiliki pengalaman yang sangat cukup dalam bidang:

- a. Audit, akuntansi, dan keuangan. Anggota komite audit memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep dan praktek tentang *financial engineering, corporate finance, auditing* (audit keuangan, audit operasional, dan audit khusus), dan *fraud examination*
- b. Peraturan perundangan. Anggota komite audit memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep dan praktek peraturan dan perundangan tentang pasar modal, pasar uang, pasar komoditas berjangka, bursa saham, UU perseroan terbatas, dan *good corporate governance*.
- c. Proses bisnis industri terkait.

Mengenai keanggotaan komite audit dan kriteria komite audit dapat dilihat sebagai berikut (YPPMI:2002):

- a. Paling sedikit satu anggota komite audit harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang keuangan akuntansi.
- b. Ketua komite audit harus hadir dalam RUPS untuk menjawab pertanyaan para pemegang saham.
- c. Komite audit harus mengundang eksekutif menurut mereka tepat (terutama pejabat bidang keuangan) untuk hadir pada rapat-rapat komite, akan tetapi apabila dipandang perlu dapat mengadakan rapat tanpa kehadiran seorangpun eksekutif perusahaan. Diluar itu direktur keuangan dan kepala satuan kerja audit intern dan seorang wakil dari auditor eksternal harus hadir sebagai peserta pada rapat-rapat komite audit.
- d. Sekretaris perusahaan harus bertindak sebagai sekretari komite audit.
- e. Wewenang komite audit harus meliputi:
 - Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya.
 - Mengusahakan saran hukum dan saran profesional lainnya yang independen apabila dipandang perlu.
 - Mencari informasi yang relevan dari setiap karyawan.
 - Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman yang sesuai apabila dianggap perlu.

Jumlah anggota komite audit disesuaikan besar-kecilnya dengan organisasi dan tanggung jawab. Namun biasanya tiga sampai lima anggota merupakan jumlah yang cukup ideal. Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat tiga sampai empat kali setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan.

D. Strutur Kepemilikan Publik

kepemilikan oleh publik merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak di luar kepemilikan manajemen perusahaan. Kepemilikan oleh publik memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses

monitoring secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang akan meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan perusahaan.

Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung mendapat pengawasan dari masyarakat dan memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga akan mengungkapkan lebih banyak informasi. Selain itu, perusahaan besar pastinya memiliki biaya keagenan yang lebih besar karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan dana tersebut. Namun hal ini tentunya akan membuat manajemen menjadi sasaran atas biaya yang dikeluarkan untuk pengawasan kinerjanya yang dilihat pengurangan laba yang pada suatu periode akibat munculnya biaya pengawasan tersebut, sehingga mereka akan mengungkapkan informasi yang lebih sedikit untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Selain itu, perusahaan besar diduga tingkat transparansi atas pelaporan informasi kinerjanya tersebut adalah sangat baik. Hal ini diprediksi dengan asumsi bahwa perusahaan besar memiliki sumberdaya-sumberdaya yang potensial dalam bidangnya masing-masing dalam mengelola jumlah aset yang besar sehingga akan berdampak pada kinerja perusahaan, dan dengan hal ini tentunya tindakan pihak manajemen akan cenderung berdampak pada pelaporan hasil kinerja tersebut, yaitu dengan mengungkapkan informasi yang rinci atau dengan tingkat transparansi yang baik demi rasa tanggungjawabnya dan keberhasilan yang dicapainya pada periode tersebut.

E. Regulasi

Regulasi adalah tatanan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan praktik pengelolaan suatu sistem pelaksanaan kerja untuk menciptakan keadaan yang patuh akan peraturan. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dan tahunan perusahaan. Beberapa literatur juga telah menemukan bahwa faktor regulasi mempunyai peran dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik demi terciptanya transparansi informasi. Pernyataan ini diasumsikan perusahaan yang melaksanakan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah secara baik, akan berupaya untuk meningkatkan pengungkapan informasi dalam pelaporannya.

Regulasi dapat berdampak pada struktur pengelolaan perusahaan karena adanya pengawasan yang lebih ketat. Black dkk. (2003) menyatakan bahwa perbankan adalah industri yang dikenai regulasi yang ketat dalam kaitannya dengan penerapan *corporate governance*. Selain perbankan, perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN) juga mendapatkan perhatian utama dalam transparansi di Indonesia.

F. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan dan kemampuan perusahaan menggunakan aktiva secara produktif, dengan demikian profitabilitas suatu perusahaan tersebut dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut. Jumlah keuntungan (laba)

yang diperoleh secara teratur serta kecendrungan atau trend keuntungan yang meningkat merupakan suatu faktor yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian di dalam menilai profitabilitas perusahaan.

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan laporan keuangan tahunan kepada pemegang saham. Tingkat profitabilitas yang tinggi mempunyai arti bahwa pihak manajemen telah berhasil dan dapat mengelola dana (modal) dari pemilik dengan baik sehingga mereka dapat menghasilkan laba yang baik pula atas pengelolaan dana tersebut. Hal ini pastinya membuat kecenderungan dan motivasi manajemen dalam melaporkan hasil yang dicapainya tersebut. Tingkat profitabilitas yang besar pastinya akan menarik minat para investor lain untuk bergabung pada perusahaan tersebut, dan atas tujuan ini pihak manajemen pastinya akan memaparkan seluruh informasi-informasi secara lengkap dalam laporan pertanggungjawabannya, sehingga hal tersebut dapat dikatakan akan mewujudkan suatu transparansi terhadap laporan tahunan (laporan keuangan) perusahaan.

G. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan besaran yang dilihat melalui jumlah aktiva secara keseluruhan yang dimiliki oleh perusahaan. Pada umumnya perusahaan yang besar mengungkapkan lebih banyak informasi dibanding perusahaan yang kecil. Hal ini dapat dikaitkan dengan *cost* yang dikeluarkan oleh perusahaan besar tersebut dalam proses pengungkapan informasinya.

Terdapat beberapa penjelasan mengenai hal-hal yang mempengaruhi ukuran perusahaan terhadap pengungkapan informasi perusahaan. Perusahaan

yang berukuran besar memiliki hubungan eksternal yang lebih luas dan berkepentingan dengan banyak pihak, baik itu pemerintah, investor asing, bank internasional dan sebagainya, serta cenderung mendapat pengawasan dari masyarakat dan memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga akan mengungkapkan lebih banyak informasi. Selain itu, perusahaan besar mungkin mempunyai biaya produksi informasi yang lebih tinggi yang berkaitan dengan pengungkapan mereka. Perusahaan besar mempunyai permasalahan yang lebih kompleks dan lebih mempunyai dasar pemilikan yang luas dibanding perusahaan kecil (Cooke, 1989 dalam Suripto).

Perusahaan besar lebih mungkin mempunyai beragam produk dan beroperasi di berbagai wilayah termasuk luar negeri. Sebagian perusahaan besar merekrut karyawan dengan keterampilan tinggi (*high skill*) yang diperlukan untuk menerapkan sistem pelaporan manajemen yang canggih sehingga dapat mengungkapkan informasi yang lebih luas. Sebagian besar pemegang saham perusahaan juga memerlukan lebih banyak pengungkapan karena tuntutan para pemegang saham dan analisis. Ukuran perusahaan juga dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset-asetnya serta menjadi jaminan bagi pemegang saham bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan *financial* yang memadai.

6. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Hubungan *Corporate Governance* dan Pengungkapan Informasi (Khomsiyah, 2003).

Tujuan utama penelitian ini adalah menguji hubungan antara penerapan *Corporate Governance* dengan tingkat pengungkapan informasi. Selain itu penelitian ini juga menguji pengaruh struktur kepemilikan masyarakat, keberadaan dewan komisaris independen, keberadaan dewan komite audit, ukuran perusahaan, dan regulasi. Ukuran perusahaan dan regulasi secara positif berhubungan dengan indeks *Corporate Governance* dan pengungkapan informasi. Struktur kepemilikan, komposisi dewan komisaris, dan keberadaan komite audit mempunyai hubungan yang signifikan dengan indeks *Corporate Governance* dan pengungkapan informasi. Namun penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya korelasi antara komposisi komisaris independen dan komite audit dengan indeks pengungkapan wajib.

2. Pengaruh Implementasi *Corporate Governance* terhadap pengungkapan informasi (Mintara, Yunita Heryani 2008).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh implementasi *Corporate Governance* terhadap pengungkapan informasi pada perusahaan yang termasuk dalam CGPI pada tahun 2002-2006. Implementasi *Corporate Governance* dan pengungkapan dalam penelitian ini adalah dua *subject* yang dapat melindungi investor dari asimetri informasi. Variabel dependen yang diujikan dalam penelitian ini adalah pengungkapan informasi, untuk dilihat pengaruhnya terhadap implementasi *Corporate Governance*. Sedangkan variabel independen

adalah *Corporate Governance*, struktur kepemilikan, keberadaan dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan regulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Corporate Governance*, dan regulasi secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi suatu perusahaan. Perusahaan dengan indeks *Corporate Governance* tinggi akan mengungkapkan informasi lebih baik dalam laporan keuangan perusahaan. Sedangkan hubungan yang signifikan antara regulasi terhadap pengungkapan sejalan dengan teori dasarnya dimana perusahaan dengan peraturan tinggi akan mengungkapkan informasi dengan lebih baik sebagai wujud rasa tanggung jawab pada *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan berada.

3. Analisis pengungkapan informasi laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (Noviani, Aida 2006).

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti beberapa faktor yang sekiranya mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Salah satu faktor yang merupakan variabel independen adalah ukuran perusahaan (kapitalisasi pasar). Sedangkan variabel dependen diwakili oleh tingkat pengungkapan informasi pada laporan tahunan dengan pemberian skor atas pengungkapan item-item yang terdaftar pada laporan tahunan. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan.

7. Hipotesis Penelitian

Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antar dua variabel atau lebih dalam rumusan proporsi yang dapat diuji secara empiris

(Indriantoro, 1999). Hipotesis dikembangkan dari telaah teoritis atau literatur. Adapun hipotesis yang diajukan berdasarkan dasar teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **Proporai Komisaris Independen dan Pengungkapan Informasi Perusahaan.**

Komisaris independen merupakan suatu badan dalam taat kelola perusahaan yang bertugas mengawasi kinerja dan kebijakan yang dilakukan oleh direksi perusahaan serta menjamin terpenuhinya hak-hak pemegang saham minoritas atas kepentingannya dalam perusahaan. Hal ini tentunya akan mendorong direksi untuk bekerja seoptimal mungkin untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pengawasan dan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas direksi ini akan mendorong direksi untuk mengungkapkan informasi secara penuh terhadap hasil yang dicapai dalam periode pelaporan tersebut.

Penelitian yang menguji pengaruh antara keberadaan komisaris independen terhadap pengungkapan informasi (penelitian Khomsiyah, 2003) membuktikan adanya hubungan yang signifikan pengaruhnya antara proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan informasi. Perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen yang proposional jumlahnya dari seluruh jumlah dewan komisaris, mampu meningkatkan transparansi dalam laporan keuangannya.

Berdasarkan analisa tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi perusahaan.

- **Ukuran Dewan Direksi dan Pengungkapan Informasi Perusahaan.**

Salah satu badan penting dalam struktur pengelolaan perusahaan adalah dewan direksi. Mereka bertanggungjawab untuk mengembangkan strategi dan menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana-rencana dalam upaya manajemen mencapai tujuan perusahaan.

Dewan direksi setidaknya akan mempengaruhi tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan (*annual report*) perusahaan. Alasannya, manajemen perusahaan pasti akan berupaya untuk mengoptimalkan kinerja yang disebabkan atas beberapa faktor, yaitu pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab tersebut, serta atas pelaksanaan tanggung jawab dewan direksi dalam menyusun dan mengarahkan strategi bisnis perusahaan (Sutojo dan Aldridge, 2005: 09).

Penelitian yang menguji Ukuran dewan direksi sebagai variabel independen terhadap pengungkapan informasi (khomsiyah, 2003) menunjukkan adanya pengaruh positif atas ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan informasi perusahaan.

Berdasarkan analisa tersebut, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H2: Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi perusahaan.

- **Keberadaan Komite Audit dan Pengungkapan Informasi Perusahaan**

Komite audit merupakan suatu badan dalam pelaksanaan *Good Corporate governance* yang termasuk dalam sistem pengendalian perusahaan. Hasil kinerja yang dilaporkan oleh pihak manajemen atas pengelolaan dana pemilik berupa

laporan keuangan merupakan proses yang telah melewati pemeriksaan, penegasan, serta pemberian saran dan perbaikan oleh komite audit. Hal tersebut bertujuan untuk menilai tingkat kewajaran dan pemberitahuan atas ketidaktepatan perhitungan terhadap item-item yang diungkapkan oleh pihak manajemen dalam laporan keuangan (*annual report*).

Berdasarkan surat edaran BEI (dulu BEJ), SE-008/BEJ/2-2001, keanggotaan komite audit terdiri sekurang-kurangnya dari 3 orang, termasuk ketua komite yang sekaligus tercatat sebagai komisaris independen. Jumlah tersebut secara proposional diduga akan mempengaruhi tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan (*annual report*) perusahaan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang berhasil menunjukkan bahwa keberadaan komite audit secara proposional berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi perusahaan dalam laporan tahunan (khomsiyah, 2003).

Berdasarkan analisa tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Keberadaan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi perusahaan.

- **Struktur Kepemilikan Publik dan Pengungkapan Informasi Perusahaan**

Proporsi kepemilikan publik merupakan besarnya jumlah saham yang dimiliki oleh publik. Pengertian publik disini adalah pihak individu yang berada diluar manajemen dan tidak memiliki hubungan yang istimewa dengan manajemen. Sebagian besar penelitian memberikan bukti yang cukup kuat mengenai adanya pengaruh struktur kepemilikan publik terhadap pengungkapan

informasi (misalnya Khomsiah, 2003). Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam penerapan *Corporate Governance*, karena seharusnya perusahaan dengan struktur kepemilikan masyarakat (publik) yang tinggi memiliki tekanan yang lebih tinggi untuk memberikan pengungkapan yang lebih baik. Perusahaan dengan kepemilikan publik lebih besar akan memberikan pengungkapan yang lebih banyak dengan alasan untuk memasarkan sahamnya.

Berdasarkan asumsi di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Struktur kepemilikan Publik berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi perusahaan.

- **Faktor Regulasi dan Pengungkapan Informasi Perusahaan**

Terdapat keterkaitan antara faktor regulasi dengan pengungkapan informasi perusahaan. Hal ini didasarkan pada penerapan prinsip tanggung jawab perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan itu berada. BUMN dan Perbankan merupakan industri yang pelaksanaan regulasinya merupakan dinilai lebih baik dibandingkan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh peraturan-peraturan yang lebih banyak ditetapkan kepada jenis industri tersebut dalam pelaksanaan kerjanya. Dapat diasumsikan bahwa perusahaan dengan tingkat regulasi tinggi cenderung untuk mengungkapkan informasinya dengan lebih baik demi mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku (Mintara, Yunita heryani, 2008 dan Khomsiyah, 2006).

Berdasarkan analisa diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Faktor Regulasi berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi perusahaan.

- **Profitabilitas dan Pengungkapan Informasi Perusahaan**

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Munawir, 1997). Tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan kinerja yang baik. Perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi akan cenderung melaporkan informasi perusahaan dengan tingkat transparansi yang tinggi pula. Hal ini bertujuan untuk menarik minat investor dalam hal penanaman saham pada perusahaannya.

Namun, penelitian sebelumnya tidak dapat membuktikan bahwa tingkat profitabilitas turut mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi dalam laporan keuangan (*annual report*) perusahaan (Mintara, Yunita Heryani 2008). Pada prinsipnya, profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan laporan keuangan tahunan kepada pemegang saham (Heinze, 1976). Tingkat profitabilitas yang tinggi mempunyai arti bahwa pihak manajemen telah berhasil dan dapat mengelola dana (modal) dari pemilik dengan baik sehingga mereka dapat menghasilkan laba yang baik pula atas pengelolaan dana tersebut. Hal ini pastinya membuat kecenderungan dan motivasi manajemen dalam melaporkan hasil yang dicapainya tersebut. Tingkat profitabilitas yang besar pastinya akan menarik minat para investor lain untuk bergabung pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan analisa diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Profitabilitas secara signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi perusahaan.

- **Ukuran Perusahaan dan Pengungkapan Informasi Perusahaan**

Ukuran perusahaan turut menentukan tingkat kepercayaan investor dalam pertimbangan penanaman modal. Semakin besar perusahaan, semakin dikenal masyarakat yang berarti semakin mudah untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan, karena perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung mendapat pengawasan dari masyarakat dan memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga akan mengungkapkan lebih banyak informasi. Kelengkapan dan transparansi informasi perusahaan akan meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi faktor ketidakpastian.

Ukuran perusahaan diukur dengan melihat total aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan, karena umumnya perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung mendapat pengawasan dari masyarakat dan memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga akan mengungkapkan lebih banyak informasi.

Pernyataan ini berhasil dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya (Noviani, Aida 2006 dan Khomsiyah 2003) yang menyatakan ukuran perusahaan merupakan variabel yang paling konsisten berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan informasi perusahaan.

Berdasarkan analisa tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi perusahaan.

8. Pandangan Islam Tentang Dasar Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

a. Dasar-dasar Pemerintahan yang baik menurut islam

Surat An-Nisaa' ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا﴾

Artinya :

58. *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

b. Teori agensi dan hubungannya dengan pengelolaan perusahaan menurut islam

Surat An Naml ayat 27

﴿قَالَ سَتَنْظُرُونَ أَصَدَقْتُ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾

Artinya :

27. Berkata Sulaiman: “Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta”.

Ayat-ayat di atas tersebut menjelaskan kepada kita bahwa dalam sistem pemerintahan islam diharuskan setiap penguasa yang memberi amanat kepada pihak yang diberi kuasa, melaksanakan pemerintahan atau kepemimpinan kepada pihak yang diberi kuasa tersebut secara adil dan baik, serta yang diberi amanat (kuasa) tersebut harus jujur dalam hal pemerintahan atas amanat tersebut. Hal tersebut berhubungan dengan pokok-pokok dalam penelitian ini mengenai bagan-bagan dalam tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) seperti Dewan Komisaris , Dewan Direksi, dan Komite Audit dalam perusahaan.

Dalam kaitannya dengan teori agensi, pihak manajemen pada setiap perusahaan atau dalam hal ini pengelola atas dana pemilik, diwajibkan untuk menciptakan suatu ketaatan dan kejujuran dalam berusaha berupa pengungkapan tranparansi yang baik demi kepentingan pemilik dan pihak yang berkepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang termasuk kelompok perusahaan LQ-45 secara berturut-turut pada tahun 2004, 2005, 2006, dan 2007.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah secara *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan target dan pertimbangan tertentu (Sekaran, 2003, dalam Yudha Pranata, 2007). Adapun pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang termasuk dalam kelompok LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Perusahaan tersebut terdaftar pada LQ-45 secara berturut-turut pada tahun 2004, 2005, 2006, dan 2007.
3. Perusahaan yang telah mempublikasikan laporan tahunan untuk tahun 2004, 2005, 2006, dan 2007.

Adapun pertimbangan untuk pemilihan sampel yang termasuk dalam kelompok LQ 45 secara berturut-turut pada tahun 2004 sampai 2007 adalah pertimbangan atas konsistensi perusahaan sehubungan dengan perwujudannya terhadap upaya yang dilakukan dalam pengungkapan informasi dalam penjaminan transparansi dan akuntabilitas laporan perusahaan tersebut.

Perusahaan yang konsisten terdaftar pada setiap tahun penelitian merupakan perusahaan yang dianggap konsisten dalam proses upaya penciptaan transparansi serta akuntabilitas terhadap pelaporan perusahaan dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Terdapat sebanyak 17 perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut selama periode 2004 sampai 2007 yang tercatat dalam kelompok LQ 45 tersebut. Adapun perusahaan-perusahaannya yaitu sebagai berikut:

Tabel III.1
Sampel Penelitian

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk
2	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk
3	ASII	Astra International Tbk
4	BBCA	Bank Central Asia Tbk
5	BNBR	Bakrie & Brothers Tbk
6	BUMI	Bumi Resources Tbk
7	INCO	International Nickel Ind .Tbk
8	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
9	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
10	ISAT	Indosat Tbk
11	KLBF	Kalbe Farma Tbk
12	MEDC	Medco Energi International Tbk
13	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk
14	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
15	SMCB	Semen Cibinong Tbk
16	TLKM	Telekomunikasi Indonesia Tbk
17	UNTR	United Tractors Tbk

2. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 1999).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang termasuk dalam kelompok perusahaan LQ-45 secara berturut-turut selama periode 2004 sampai 2007.

Data mengenai Praktik *Corporate Governance* yang dilihat dari Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, Keberadaan Komite Audit, serta data Struktur Kepemilikan Publik, Regulasi, Profitabilitas (indeks ROE), dan Ukuran Perusahaan, diperoleh dari data yang telah dipublikasikan pada *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) dan website www.idx.co.id, berupa Laporan Tahunan dan *Company Report* masing-masing perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

3. Definisi Operasi Dan Pengukuran Variabel

A. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah indeks pengungkapan informasi dalam laporan tahunan masing-masing perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian. Indeks pengungkapan tersebut diukur dengan menggunakan kriteria penilaian *annual report award* (ARA) 2007, yaitu berupa butir-butir kriteria yang harus dipenuhi dalam pengungkapan informasi. Setiap informasi yang diungkapkan, diberi bobot satu (1) atas pengungkapan tersebut. Pengukuran pengungkapan menggunakan ARA 2007 tersebut dihitung sebagai berikut:

$$IP = i/k$$

Keterangan :

IP = Indeks pengungkapan informasi

I = Jumlah butir Informasi yang diungkapkan

K = Jumlah semua butir pengungkapan informasi (ARA 2007)

B. Variabel Independen (X)

Variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah:

a. Proporsi Komisaris Independen

Proporsi komisaris independen menggambarkan persentase jumlah komisaris yang bebas dan tidak memiliki hubungan dengan direktur atau komisaris lainnya (independen) dalam perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

Proporsi Komisaris Independen

$$= \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh anggota komisaris}} \times 100\%$$

b. Ukuran Dewan Direksi

Ukuran Dewan Direksi merupakan pihak-pihak yang berada dibawah naungan Dewan Komisaris yang bertugas untuk mengembangkan strategi dan menjamin keberhasilan usaha. Ukuran dewan direksi yaitu jumlah anggota dewan direksi dalam perusahaan sampel penelitian.

c. Keberadaan Komite Audit

Komite Audit merupakan badan atau komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bertugas dalam pengendalian dan pengawasan internal perusahaan.

Keberadaan Komite Audit yaitu jumlah anggota komite audit termasuk ketua komite audit dalam perusahaan.

d. Struktur Kepemilikan Publik

Struktur Kepemilikan Publik yaitu kepemilikan atas perusahaan diluar kepemilikan oleh manajemen perusahaan.

Struktur kepemilikan publik diukur dengan persentase kepemilikan oleh publik terhadap total saham yang dimiliki oleh perusahaan.

e. Regulasi

Faktor regulasi diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu perusahaan yang dikategorikan dalam industri perbankan dan BUMN, diberi nilai 1, selain itu diberi nilai 0.

f. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan asset atau modal yang dimilikinya.

Profitabilitas dihitung dengan menggunakan indeks Return On Equity (ROE).

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Ekuitas}}$$

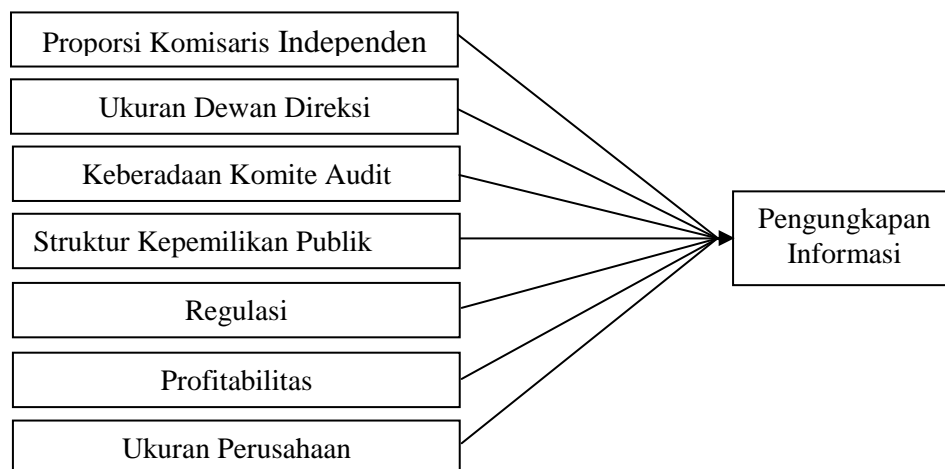
g. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan besaran perusahaan yang diukur melalui jumlah asset yang telah ditabulasi dalam bentuk logaritma natural.

4. Kerangka Skematis Model Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat suatu rerangka teoritis yang dapat digambarkan model penelitian dalam bentuk diagram skematik pada gambar dibawah ini :

Gambar III. 1
Model Penelitian



5. Metode Analisis dan pengolahan data

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan praktik *Corporate Governance* terhadap pengungkapan informasi. Indeks Pengungkapan yang tinggi mungkin disebabkan adanya penerapan transparansi yang baik oleh perusahaan, atau merupakan keputusan manajemen yang telah menerapkan *Good Corporate Governance* (Khomsiyah, 2003).

Dalam menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda. Berdasarkan hipotesis yang diajukan diatas, maka diperoleh model penelitian terhadap hubungan antar variabel sebagai berikut:

$$IP = \alpha + \beta_1 IND + \beta_2 DIR + \beta_3 KAUD + \beta_4 PUB + \beta_5 DREG + \beta_6 PROFT + \beta_7 SIZE + \varepsilon$$

Keterangan :

IP	: Indeks Pengungkapan
IND	: Proporsi Komisaris Independen
DIR	: Ukuran Dewan Direksi
KAUD	: Keberadaan Komite Audit
PUB	: Struktur Kepemilikan Publik
DREG	: Regulasi
PROFT	: Profitabilitas
SIZE	: Ukuran Perusahaan

A. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan dalam penelitian (Indriantoro dan Supomo, 1999:170). Pengujian ini dilakukan untuk menentukan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi masing-masing variabel independen dan dependen.

B. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah data yang terdistribusi normal. Jika data yang dihasilkan tidak berdistribusi normal, maka tes statistik yang dihasilkan tidak valid.

Alat diagnostik yang digunakan untuk memeriksa data yang memiliki distribusi normal adalah *normal probability plot*. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas data (Ghozali, 2005: 112). Jika data menjauhi garis diagonal maka data tidak memenuhi asumsi normalitas data.

C. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari bias yang mengakibatkan hasil yang diperoleh tidak valid. Jika hasil regresi tersebut tidak memenuhi uji asumsi klasik, maka hasil regresi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Uji asumsi klasik tersebut diantaranya:

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel bebas berhubungan secara linear. Uji multikolinearitas artinya ada hubungan kuat antara semua atau beberapa variabel penjelas dalam model regresi yang digunakan. Menurut Gujaranti dalam Theresia (2005), adanya multikolinearitas yang kuat akan mengakibatkan ketidaktepatan estimasi. Metode yang digunakan untuk

mendeteksi adanya multikolonears ini adalah dengan menggunakan *variance inflation factor* atau VIF yang merupakan kebalikan dari toleransi sehingga formulanya adalah sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{(1 - R^2)}$$

R^2 merupakan koefisien determinasi. Bila toleransi kecil artinya menunjukkan nilai VIF besar. Untuk itu bila $VIF > 5$ maka dianggap ada multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya, sebaliknya jika nilai $VIF < 5$ maka dianggap tidak terdapat multikolineritas (Santoso, 2001; 357).

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson, dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai Durbin-Watson. Kriteria yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel III. 2
Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson (Al-Ghozali; 2007) :

DW	KESIMPULAN
$0 < d < d_l$	Ada autokorelasi positif
$d_l \leq d \leq d_u$	Tanpa kesimpulan
$d_u < d < 4 - d_u$	Tidak ada autokorelasi
$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$	Tanpa kesimpulan
$4 - d_l < d < 4$	Ada autokorelasi negatif

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu observasi ke observasi yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut *homoskedastisitas*, dan jika berbeda disebut *heteroskedastisitas*. Heteroskedastisitas menggambarkan nilai hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *studentized delete residual* nilai tersebut. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada satu model dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot model. Analisis pada gambar Scatterplot yang menyatakan model regresi linier berganda tidak terdapat heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain itu untuk mendukung hasil analisis grafik, pada penelitian ini juga digunakan uji glejser untuk menguji gejala heteroskedastisitas, yaitu nilai absolute residual diregresikan pada tiap-tiap variabel independen. Masalah heteroskedastisitas terjadi jika ada variabel yang secara statistik signifikan ($\text{signifikansi} < 0.05$).

D. Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui secara signifikan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji partial dilakukan dengan bantuan uji t statistik (Gujarati, 2005).

Uji t dilakukan dengan dua arah (2 tails), yaitu dengan penentuan tingkat keyakinan sebesar 95 % (yaitu tingkat yang merupakan standar keyakinan untuk penelitian bisnis) dan menentukan *level of significant* sebesar 5 % yang merupakan tingkat signifikansi pengaruh hubungan variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan *degree of detail* (df) = n - k. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, dengan kata lain variabel independen secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, dengan kata lain variabel independen secara individual tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Simultan (Uji F)

Setelah dilakukan Uji parsial, berikutnya dilakukan Uji simultan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian secara bersama-sama ini menggunakan F_{hitung} dan F_{tabel} (Gujarati, 1995). Sebelum membandingkan nilai F tersebut, harus ditentukan tingkat kepercayaan $(1-\alpha)$ dan derajat kebebasan

(*degree of freedom* = $n - (k+1)$) agar dapat ditentukan nilai kritisnya. Alfa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0.05 dengan hipotesis dua sisi (2 tail).

Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $p\text{-value} > \alpha$ dikatakan tidak signifikan dan H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai hubungan dengan variabel dependen. Sebaliknya jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $p\text{ value} < \alpha$ dikatakan signifikan H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti variabel independen secara bersama-sama mempunyai hubungan dengan variabel dependen.

E. Koefisien Determinansi

Koefisien determinansi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (Gujarati, 1995). Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen (Komisaris Independen, Ukuran dewan direksi, Komite Audit, Struktur kepemilikan publik, Faktor regulasi, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan) dapat menjelaskan variabel dependennya (Pengungkapan informasi Perusahaan). Semakin besar koefisien determinansinya, semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Dengan demikian regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.

Untuk mengetahui variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen dapat dilihat dari koefisien korelasi parsialnya. Variabel independen yang memiliki koefisien korelasi parsial yang paling besar merupakan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan hasil dari analisis data berdasarkan pengamatan sejumlah variabel yang digunakan dalam model analisis regresi berganda untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara signifikan Penerapan Praktik *Good Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan Publik, Faktor Regulasi, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Independen terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Perusahaan sebagai Variabel Dependen dalam penelitian ini.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Pada bagian ini dijelaskan dan digambarkan secara umum data penelitian yang telah ditransformasi sehingga mudah dipahami. Statistik Deskriptif disajikan untuk melihat nilai maksimum (max), nilai minimum (min), nilai rata-rata (mean), serta standar deviasi variable-variabel dalam penelitian ini.

Tabel IV.1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Proporsi Komisaris Independen	68	.2000	.7500	.401765	.1072859
Ukuran Dewan Direksi	68	3	11	6.72	2.079
Komite Audit	68	2	7	3.76	1.121
Struktur Kepemilikan Publik	68	.0300	.7500	.395147	.1650825
Regulasi	68	0	1	.35	.481
Profitabilitas	68	-.2500	1.3600	.348676	.2919922
Ukuran Perusahaan	68	28.5000	33.0200	30.462794	1.1165149
Indeks Pengungkapan	68	.6000	.9100	.744412	.0738571
Valid N (listwise)	68				

Sumber : Data Olahan SPSS

Dari pengamatan tabel Statistik Deskriptif diatas, dapat dijelaskan bahwa dari 68 jumlah sampel dalam penelitian ini. Nilai minimum proporsi komisaris independen adalah sebesar 0,2000, sedangkan nilai maksimumnya adalah sebesar 0,7500, serta nilai rata-rata (mean) dan standar deviasinya masing-masing sebesar 0,401765 dan 0,1072859. Ukuran dewan direksi memiliki nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 3 dan 11, serta rata-rata dan standar deviasi masing-masing sebesar 6,72 dan 2,079. Sedangkan Variabel Komite Audit, memiliki nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 7, dengan rata-rata dan standar deviasi masing-masing sebesar 3,76 dan 1,121.

Struktur kepemilikan Publik memiliki nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 0,0300 dan 0,7500, dengan rata-rata dan standar deviasi masing-masing sebesar 0,395147 dan 0,1650825. Faktor regulasi merupakan variabel *dummy* yang memiliki 2 nilai yaitu 1 dan 0. Nilai minimum dan maksimum variabel ini masing-masing sebesar 0 dan 1 dengan rata-rata dan standar deviasi masing-masing sebesar 0,35 dan 0,481. Selain itu, Profitabilitas memiliki nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar -0,2500 dan 1,3600, serta dengan nilai rata-rata dan standar deviasi masing-masing sebesar 0,348676 dan 0,29199122. Ukuran perusahaan memiliki nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 28,5000 dan 33,0200 dengan rata-rata dan standar deviasi masing-masing sebesar 30,462794 dan 1,1165149.

Sedangkan sebagai variabel dependen (terikat), Indeks pengungkapan dari 68 sampel dalam penelitian ini memiliki nilai minimum dan maksimum masing-

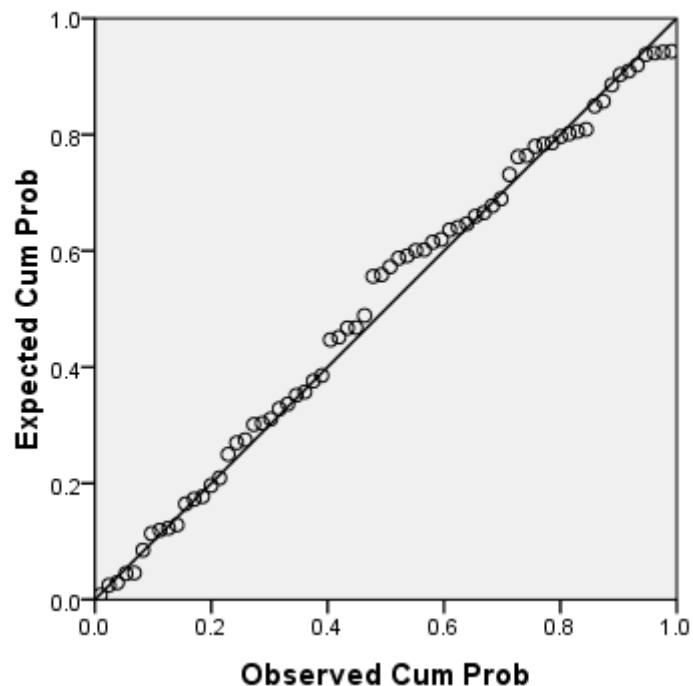
masing sebesar 0,6000 dan 0,9100 dengan rata-rata dan standar deviasi masing-masing sebesar 0,744412 dan 0,738571.

2. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak.

Alat diagnostik yang digunakan untuk memeriksa data yang memiliki distribusi normal adalah *normal probability plot*. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas data (Ghozali, 2005: 112). Jika data menjauhi garis diagonal maka data tidak memenuhi asumsi normalitas data.

Gambar IV.1
Normal Probability Plot Standardized Residual
Dependent Variable: Indeks Pengungkapan



Dari *normal probability plot* diatas dapat dilihat secara seksama bahwa data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas data.

Selain menggunakan *normal probability plot*, untuk mendukung hasil pada normal probability plot di atas, uji normalitas data digunakan juga analisis statistik dengan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal

Adapun kriteria pengujian yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis (H_a) diatas adalah, jika signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak dan signifikansi $> 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

Tabel IV.2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05709609
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.047
	Negative	-.890
Kolmogorov-Smirnov Z		.730
Asymp. Sig. (2-tailed)		.660

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data Olahan SPSS

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil uji K-S pada penelitian ini dimana dapat dilihat nilai K-S adalah sebesar 0,660 dengan signifikansi sebesar 0,660

untuk Indeks Pengungkapan sebagai variabel dependen. Hal ini membuktikan bahwa data terdistribusi secara normal atau mendekati normal karena signifikansi lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$). Hal ini sesuai dengan pernyataan dengan menggunakan *Normal Probability Plot* yang menyatakan model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas data.

3. Uji Asumsi Klasik

A. Uji Multikoleniaritas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Untuk mengetahui adanya multikoleniaritas adalah dengan menggunakan *variance inflation factor* atau VIF yang merupakan kebalikan dari toleransi.

Apabila nilai $VIF > 5$ maka dianggap ada multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya, sebaliknya jika nilai $VIF < 5$ maka dianggap tidak terdapat multikoleniaritas (Santoso, 2001; 357).

Tabel IV.3
Uji Multikoleniaritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.489	.222		2.203	.031		
Proporsi Komisaris Independen	.025	.080	.036	.310	.758	.743	1.346
Ukuran Dewan Direksi	-.007	.005	-.198	-1.547	.127	.609	1.643
Komite Audit	.017	.008	.261	2.230	.029	.727	1.375
Struktur Kepemilikan Publik	.059	.051	.132	1.158	.251	.767	1.304
Regulasi	.037	.018	.244	2.035	.046	.691	1.447
Profitabilitas	.062	.030	.246	2.074	.042	.709	1.410
Ukuran Perusahaan	.006	.008	.084	.714	.478	.712	1.405

a. Dependent Variable: Indeks Pengungkapan

Sumber : Data Olahan SPSS

Dari tabel hasil olahan data dengan menggunakan program SPSS diatas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance tiap-tiap variable independen jauh diatas 0,05 ($> 5\%$), serta nilai VIF tiap-tiap variabel independen adalah kurang dari 10 ($VIF < 10$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikoleniaritas antar variabel independen dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

B. Uji Autokelerasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu pada periode sebelumnya. Uji autokorelasi dilakukan dengan menghitung nilai *Durbin-Watson d statistic* dengan kriteria Durbin-Watson 68 sampel adalah :

Tabel IV.4
Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson

DW	KESIMPULAN
$<1,370$	Ada autokorelasi positif
$1,370 - 1,843$	Tanpa kesimpulan
$1,843 - 2,157$	Tidak ada autokorelasi
$2,157 - 2,630$	Tanpa kesimpulan
$>2,630$	Ada autokorelasi negatif

Sesuai dengan kriteria Durbin-Watson tersebut, dengan sampel sebanyak 68 nilai DW dari masing-masing regresi harus berada diantara daerah yang nilainya bebas atau tidak mengalami masalah autokorelasi. Dalam penelitian ini, hasil analisis dari uji *Durbin-Watson d statistic* adalah :

Tabel IV.5
Durbin-Watson
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.634 ^a	.402	.333	.0603348	1.392

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Struktur Kepemilikan Publik, Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Regulasi, Ukuran Dewan Direksi

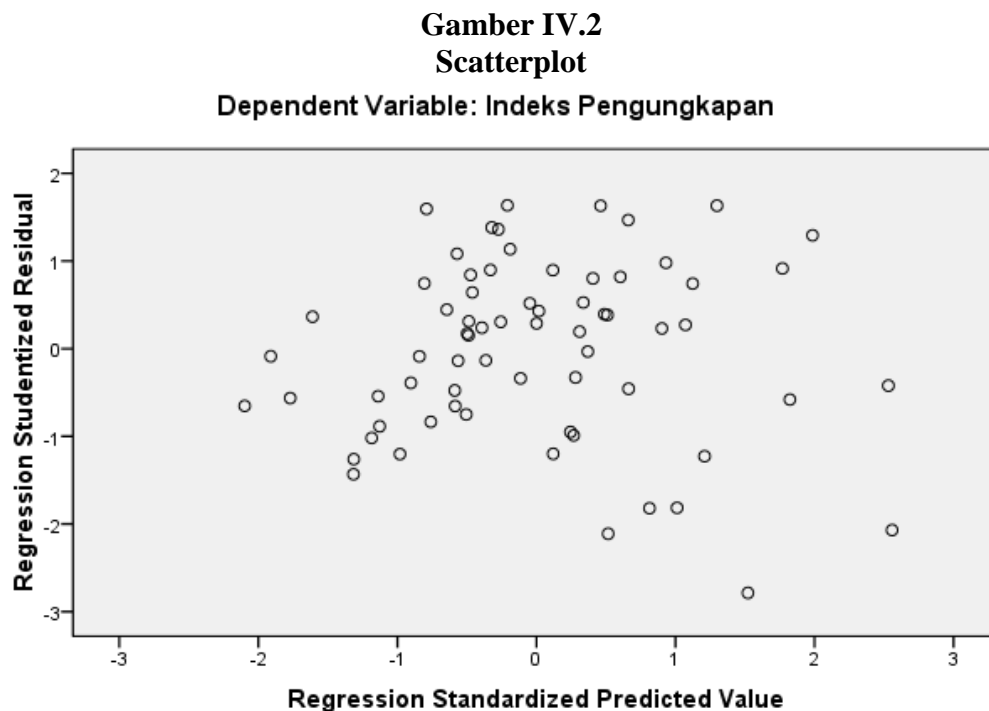
b. Dependent Variable: Indeks Pengungkapan

Sumber : Data Olahan SPSS

Dari hasil analisis diatas, dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson adalah sebesar 1,392. Nilai DW tersebut terletak pada daerah tanpa kesimpulan. Dengan hal demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tidak dapat ditentukan apakah terdapat autokorelasi negatif atau positif sehingga penelitian dapat dilanjutkan dan dianggap tidak terdapat autokorelasi dalam penelitian ini.

C. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Pengujian heteroskedastisitas dalam model regresi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut *homoskedastisitas*, dan jika berbeda disebut *heteroskedastisitas*. hasil dari pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini :



Dari grafik *scatterplots*, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Indeks Pengungkapan berdasarkan masukan variabel independen Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Keberadaan Komite Audit, Struktur Kepemilikan Publik, Regulasi, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan.

Untuk mendukung hasil tes uji heteroskedastisitas, selain melihat dari grafik *scatterplots*, maka dilakukan Uji glejser pada penelitian ini. Yaitu nilai absolute residual diregresikan pada tiap-tiap variabel independen. Masalah heteroskedastisitas terjadi jika ada variabel yang secara statistik signifikan (signifikansi < 0.05). Hasil dari uji glejser pada penelitian ini yaitu

Tabel IV.6
Glejser Test

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.142	.118		1.208	.232		
Proporsi Komisaris Independen	-.017	.042	-.055	-.396	.693	.743	1.346
Ukuran Dewan Direksi	-.002	.002	-.112	-.725	.471	.609	1.643
Komite Audit	.004	.004	.123	.870	.388	.727	1.375
Struktur Kepemilikan Publik	.024	.027	.121	.874	.386	.767	1.304
Regulasi	.006	.010	.087	.598	.552	.691	1.447
Profitabilitas	.017	.016	.155	1.083	.283	.709	1.410
Ukuran Perusahaan	-.004	.004	-.122	-.853	.397	.712	1.405

a. Dependent Variable: AbsUt

Sumber : Data Olahan SPSS

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari persamaan regresi linier berganda setelah dilakukan uji glejser tidak ada yang lebih kecil dari 0.05, artinya persamaan regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil ini mendukung analisis grafik yang telah dilakukan terlebih dahulu.

4. Analisis Hasil Regresi

Hasil uji regresi menunjukkan apakah terdapat pengaruh signifikan variabel-variabel independen (bebas), yaitu Praktik dalam penerapan *Good Corporate Governance* berupa Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, Komite Audit, serta Struktur Kepemilikan Publik, Faktor Regulasi, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan yang diukur dengan Indeks Pengungkapan laporan tahunan perusahaan.

A. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Berikut ini adalah analisis regresi secara parsial untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara sendiri-sendiri (parsial).

Tabel IV.7
Regresi Parsial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.489	.222		2.203	.031		
Proporsi Komisaris Independen	.025	.080	.036	.310	.758	.743	1.346
Ukuran Dewan Direksi	-.007	.005	-.198	-1.547	.127	.609	1.643
Komite Audit	.017	.008	.261	2.230	.029	.727	1.375
Struktur Kepemilikan Publik	.059	.051	.132	1.158	.251	.767	1.304
Regulasi	.037	.018	.244	2.035	.046	.691	1.447
Profitabilitas	.062	.030	.246	2.074	.042	.709	1.410
Ukuran Perusahaan	.006	.008	.084	.714	.478	.712	1.405

a. Dependent Variable: Indeks Pengungkapan

Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan pada tabel di atas, maka dapat dituliskan model regresi sebagai berikut :

$$IP = 0,489 + 0,025 IND - 0,007 DIR + 0,017 KAUD + 0,059 PUB + 0,037 REG \\ + 0,062 PROFT + 0,006 SIZE + \varepsilon$$

Dari nilai intersep pada model regresi di atas sebesar 0,489 dapat diartikan bahwa Variabel dependen yaitu Indeks pengungkapan informasi akan bernilai sebesar 0,489 apabila variabel-variabel independen dalam model regresi tersebut bernilai konstan atau sama dengan 0.

Variabel Proporsi Komisaris Independen (IND) yang memiliki koefisien regresi sebesar 0,025 memiliki arti bahwa setiap adanya penambahan proporsi komisaris independen sebesar 1%, Indeks Pengungkapan Informasi sebagai

variabel dependennya akan mengalami peningkatan sebesar 0,025 atau sebesar 2,5% dari akibat peningkatan proporsi komisaris independen tersebut. Dengan kata lain, Variabel Proporsi Komisaris Independen ini berpengaruh positif terhadap Indeks Pengungkapannya. Semakin besar jumlah Proporsi Komisaris Independen pada perusahaan, semakin tinggi pula tingkat transparansi terhadap informasi perusahaannya.

Selain itu, koefisien regresi dari Variabel Ukuran Dewan Direksi (DIR) sebesar -0,007 memiliki arti yaitu setiap adanya penambahan sebesar 1 (satu) satuan dari Variabel Ukuran Dewan Direksi, Indeks Pengungkapan sebagai variabel dependennya akan mengalami penurunan sebesar 0,007 atau 0,07%. Hal ini dapat diartikan bahwa Variabel Ukuran Dewan Direksi (DIR) memiliki hubungan negatif terhadap Indeks Pengungkapan sebagai variabel dependennya. Dengan kata lain, semakin besar jumlah direksi pada perusahaan, semakin sedikit transparansi terhadap tingkat informasi perusahaan tersebut.

Koefisien regresi Variabel Komite Audit (KAUD) sebesar 0,017 mengandung makna yaitu setiap adanya penambahan anggota Komite Audit perusahaan sebanyak 1 anggota, akan mengakibatkan peningkatan terhadap indeks pengungkapan informasi pada perusahaan tersebut sebesar 0,017 atau 1,7%. Hal ini merupakan suatu hal yang positif Variabel Komite Audit terhadap Variabel Independennya yaitu Indeks Pengungkapan. Dan juga sebaliknya, adanya pengurangan anggota Komite Audit sebesar 1 anggota komite, akan mengakibatkan turunnya indeks pengungkapan informasi perusahaan tersebut sebesar 1,7%.

Koefisien regresi Variabel Struktur Kepemilikan Publik (PUB) sebesar 0.059 memiliki arti yaitu setiap adanya penambahan terhadap Kepemilikan Publik perusahaan sebesar 1 %, Indeks Pengungkapan sebagai variabel dependennya akan mengalami peningkatan sebesar 0,059 atau 5,9%. Hal ini dapat diartikan bahwa adanya hubungan yang positif Variabel Struktur kepemilikan Publik terhadap Indeks Pengungkapan. Semakin tinggi jumlah kepemilikan public oleh perusahaan tersebut, semakin tinggi pula tingkat atau indeks pengungkapan informasi pada perusahaan tersebut.

Disamping itu, dapat kita lihat bahwa Variabel Regulasi (DREG) yang merupakan variabel *dummy*, memiliki koefisien regresi sebesar 0,037. Perusahaan yang termasuk pada kelompok BUMN dan BANK dikategorikan sebagai *dummy* 1, sedangkan selain dari pada itu, dikategorikan sebagai *dummy* 0. Koefisien regresi sebesar 0,037 tersebut dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan yang termasuk sebagai kelompok usaha BUMN dan BANK memiliki Indeks Pengungkapan Informasi lebih tinggi sebesar 0,037 atau 3,7% dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan non BUMN dan BANK. Atau dengan kata lain perusahaan-perusahaan non BUMN dan BANK memiliki Indeks Pengungkapan Informasi yang lebih rendah dibandingkan perusahaan-perusahaan BUMN dan BANK sebesar 3,7%.

Selain itu, koefisien regresi Variabel Profitabilitas (PROFT) sebesar 0.062 mempunyai arti bahwa setiap adanya peningkatan profitabilitas perusahaan sebesar 1 %, Indeks Pengungkapan Informasi perusahaan tersebut akan meningkat sebesar 0,062 atau sebesar 6,2%. Hal ini juga dapat diartikan bahwa tingkat

Profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap Indeks Pengungkapan Informasinya. Adanya tingkat kemampuan perusahaan yang baik dalam memperoleh laba akan berdampak baik pula bagi pengungkapan informasi perusahaan tersebut. Begitu juga sebaliknya, Apabila perusahaan tersebut memiliki tingkat Profitabilitas yang rendah, maka Indeks Informasi yang diungkapkan akan menjadi berkurang.

Selain itu, Koefisien regresi Variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) sebesar 0.006 memiliki arti bahwa setiap terjadi penambahan atau peningkatan terhadap Asset Perusahaan sebesar 1 satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan terhadap variabel dependennya Indeks Pengungkapan sebesar 0,006 atau 0,6%. Hal ini dapat diartikan bahwa Variabel SIZE berpengaruh positif terhadap variabel dependennya yaitu Indeks Pengungkapan. Dalam hal ini, besarnya Aset yang dimiliki oleh perusahaan akan menjadi faktor terhadap tingkat transparansi atas pengungkapan informasi perusahaannya.

- **Adanya Pengaruh Signifikan Proporsi Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.**

Pengujian hipotesis pertama penelitian ini dilakukan dengan menggunakan formulasi hipotesis sebagai berikut :

$H_{01} : t_{hitung} < t_{tabel} : \text{Proporsi Komisari Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.}$

H_{a1} : $t_{hitung} > t_{tabel}$: Proporsi Komisari Independen berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.

Kriteria pengujian yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis (H_{a1}) di atas adalah : jika nilai t hitung Proporsi Komisaris Independen lebih besar dari nilai t tabelnya, maka H_{a1} diterima, yang berarti Proporsi Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila t hitung Proporsi Komisaris Independen lebih kecil dari nilai t tabelnya, maka H_{a1} ditolak, yang berarti Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.

Hasil penelitian didapat bahwa nilai t hitung Proporsi Komisaris Independen adalah sebesar 0,310. Sedangkan nilai t tabel dari sampel pada penelitian ini adalah sebesar 2,000. Hal tersebut berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,310 < 2,000$), sehingga H_{a1} ditolak dan H_{01} diterima. Selain itu, juga dapat dilihat bahwa nilai $p-value$ sebesar 0,758 atau sebesar 75,8% berada jauh diatas tingkat signifikansi 0,05. Artinya, Proporsi Komisaris Independen yang dijadikan sebagai penilai dalam Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan. Semakin tinggi Proporsi Anggota Komisari Independen dapam perusahaan, semakin sedikit informasi yang diungkapkan terhadap indeks pengungkapan perusahaan tersebut dalam laporan tahunannya.

Hal ini mungkin disebabkan oleh masih lemahnya penerapan praktik *Corporate Governance* di Indonesia. Pada kenyataannya, dalam praktiknya belum ada mekanisme tentang bagaimana pemegang saham memilih komisaris independen ini, sehingga walaupun dewan komisaris ini telah ada namun tidak diketahui bagaimana penunjukannya. Kondisi yang demikian masih memperluas kesempatan bagi beberapa pihak untuk melakukan praktik KKN, salah satunya dengan penunjukkan anggota komisaris independen yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan direksi perusahaan. Hal ini akan sangat melemahkan aplikasi *Corporate Governance*, karena dengan adanya transaksi dengan orang dalam (*insider transaction*), penyelewengan (*fraud*) dan sebagainya akan membawa *Corporate Governance* dalam kondisi yang semakin terpuruk dan hal ini akan membawa imbas pada pengungkapan informasi yang menjadi bagian dalam transparansi sebagai salah satu prinsip *Corporate Governance*.

- **Adanya Pengaruh Signifikan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.**

Pengujian hipotesis kedua penelitian ini dilakukan dengan menggunakan formulasi hipotesis sebagai berikut :

$H_{02} : t_{hitung} < t_{tabel} : \text{Ukuran Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.}$

$H_{a2} : t_{hitung} > t_{tabel} : \text{Ukuran Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.}$

Kriteria pengujian yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis (H_{a2}) di atas adalah : jika nilai t hitung Ukuran Dewan Direksi lebih besar dari nilai t tabelnya, maka H_{a2} diterima, yang berarti Ukuran Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan. Begitu juga dengan sebaliknya, jika nilai t hitung Ukuran Dewan Direksi lebih kecil dari nilai t tabelnya, maka H_{a2} ditolak, yang berarti Ukuran Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.

Hasil penelitian didapat bahwa nilai t hitung Variabel Ukuran Dewan Direksi adalah sebesar -1,547. Sedangkan nilai t tabel dari sampel pada penelitian ini adalah sebesar 2,000. Hal tersebut berarti t hitung $<$ t tabel ($-1,547 < 2,000$), sehingga H_{a2} ditolak dan H_{02} diterima. Selain itu, penolakan atas hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan terhadap Indeks Pengungkapanpun dapat dijelaskan oleh *p-value* sebesar 0,127 yang nilainya jauh pada signifikansi 0,05. Artinya, Ukuran Dewan Direksi yang dijadikan sebagai penilai praktik *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan. Semakin banyak atau semakin tinggi Ukuran Dewan Direksi pada perusahaan, semakin sedikit informasi yang diungkapkan dalam publikasi laporan tahunan perusahaan tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya, semakin sedikit jumlah keanggotaan Dewan Direksi pada perusahaan tersebut, semakin luas informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan tersebut.

Hal ini juga mungkin disebabkan oleh masih lemahnya penerapan praktik *Good Corporate Governance* di Indonesia. Kebijakan-kebijakan perusahaan yang

dibuat, terkadang tidak sepenuhnya dijalankan dengan berpedoman pada kelangsungan hidup perusahaan. Banyak pihak yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan bersama dalam berusaha, contohnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang mengakibatkan penyelewengan terhadap suatu laporan yang dapat berdampak pada transparansi laporan tersebut.

- **Adanya Pengaruh Signifikan Keberadaan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.**

Pengujian hipotesis keempat penelitian ini dilakukan dengan menggunakan formulasi hipotesis sebagai berikut :

$H_{03} : t_{hitung} < t_{tabel} : \text{Keberadaan Komite Audit tidak berpengaruh Signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.}$

$H_{a3} : t_{hitung} > t_{tabel} : \text{Keberadaan Komite Audit berpengaruh Signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.}$

Kriteria pengujian yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis (H_{a3}) di atas adalah : jika nilai t_{hitung} Komite Audit lebih besar dari nilai $t_{tabelnya}$, maka H_{a3} diterima, yang berarti Keberadaan Komite Audit Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika nilai t_{hitung} Komite Audit lebih kecil dari nilai $t_{tabelnya}$, maka H_{03} ditolak, yang berarti Keberadaan Komite Audit Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.

Pada hasil penelitian, didapat nilai t hitung Komite Audit sebesar 2,230. Sedangkan nilai t tabel adalah sebesar 2,000 sehingga dapat dilihat bahwa t hitung $>$ t tabel ($2.230 > 2,000$). Hal ini dapat diartikan bahwa H_{03} ditolak dan H_{a3} yang menyatakan bahwa Keberadaan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi perusahaan diterima. Selain itu, p -value juga menunjukkan nilai yang berada pada tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 0,029, atau $0,029 < 0,05$. Hal ini berarti Keberadaan Komite Audit pada perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pengungkapan Informasi Perusahaannya. Semakin banyak jumlah keanggotaan Komite Audit pada perusahaan, semakin luas pula tingkat pengungkapan yang diungkapkan perusahaan tersebut dalam laporan tahunannya. Begitu juga dengan sebaliknya, semakin sedikit anggota Komite Audit perusahaan, semakin sedikit pula informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan tersebut.

Hal ini sesuai dengan fungsi komite audit itu sendiri, yaitu sebagai badan yang termasuk dalam sistem pengendalian internal perusahaan. Upaya dalam pengawasan, etika bisnis, independensi, serta dalam pengungkapan akurat dan tepat waktu dapat membuat komite audit menjaga dan menjamin keterbukaan terhadap informasi-informasi yang dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

- **Adanya Pengaruh Signifikan Struktur Kepemilikan Publik Terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.**

Pengujian hipotesis kelima penelitian ini dilakukan dengan menggunakan formulasi hipotesis sebagai berikut :

$H_{04} : t_{hitung} < t_{tabel} : \text{Struktur Kepemilikan Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.}$

$H_{a4} : t_{hitung} > t_{tabel} : \text{Struktur Kepemilikan Publik berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.}$

Kriteria pengujian yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis (H_{a4}) di atas adalah : jika nilai t_{hitung} Struktur Kepemilikan Publik lebih besar dari nilai t_{tabel} -nya, maka H_{a4} diterima, yang berarti Struktur Kepemilikan Publik berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan. Begitu juga sebaliknya, jika nilai t_{hitung} Struktur Kepemilikan Publik lebih kecil dari nilai t_{tabel} -nya, maka H_{a4} ditolak, yang berarti Struktur Kepemilikan Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.

Hasil penelitian didapat bahwa nilai t_{hitung} Struktur Kepemilikan Publik adalah sebesar 1,182. Sedangkan nilai t_{tabel} dari sampel pada penelitian ini adalah sebesar 2,000. Hal tersebut berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,158 < 2,000$), Selain itu, *p-value* memiliki nilai 0,251, dimana nilai tersebut tidak signifikan pada tingkat 0,05 ($0,251 > 0,05$), sehingga H_{a4} ditolak dan H_{04} diterima. Artinya, Struktur Kepemilikan Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh publik, semakin kurang transparansi pada indeks pengungkapan perusahaan, dan

sebaliknya. Semakin sedikit jumlah kepemilikan perusahaan oleh publik, semakin luas tingkat transparansi pengungkapan informasi perusahaan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan publik yang besar tidak menjamin manajemen untuk lebih memfokuskan atau memperhatikan keterbukaan informasi-informasi terhadap kepemilikan perusahaan yang tinggi oleh publik tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh masih lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia, serta praktik-praktik KKN yang disebabkan oleh faktor kepentingan yang marak terjadi di dalam tubuh perusahaan-perusahaan Indonesia, sehingga manipulasi data dan penginformasian data yang tidak benar merupakan hal yang lumrah dan dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak salah. Beberapa faktor tersebut mengakibatkan lemahnya praktik pengungkapan dan keterbukaan serta tidak efektifnya mekanisme pengungkapan informasi dalam suatu perusahaan.

- **Adanya Pengaruh Signifikan Faktor Regulasi Terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.**

Pengujian hipotesis keempat penelitian ini dilakukan dengan menggunakan formulasi hipotesis sebagai berikut :

$H_{05} : t_{hitung} < t_{tabel} : \text{Faktor Regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.}$

$H_{a5} : t_{hitung} > t_{tabel} : \text{Faktor Regulasi berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.}$

Kriteria pengujian yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis (H_{a5}) di atas adalah : jika nilai t_{hitung} Regulasi lebih besar dari nilai t

tabelnya, maka H_{a5} diterima, yang berarti Faktor Regulasi berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan. Begitu juga dengan sebaliknya, jika nilai t hitung Regulasi lebih kecil dari nilai t tabelnya, maka H_{a5} ditolak, yang berarti Regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.

Pada penelitian ini, regulasi merupakan variabel *dummy* yang memiliki 2 kriteria, yaitu kriteria *dummy* 1 adalah perusahaan-perusahaan yang dikategorikan pada bidang usaha BUMN dan BANK, sedangkan *dummy* 0 adalah perusahaan-perusahaan yang bukan BUMN dan BANK tersebut.

Hasil penelitian didapat bahwa nilai t hitung Regulasi adalah sebesar 2,035. Sedangkan nilai t tabel dari sampel pada penelitian ini adalah sebesar 2,000. Hal tersebut berarti t hitung $>$ t tabel ($2,035 > 2,000$), Selain itu *p-value* juga menunjukkan 0,046 signifikan pada tingkat 0,05 ($0,046 < 0,05$), sehingga H_{05} ditolak dan H_{a5} diterima. Artinya, Faktor Regulasi berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya faktor regulasi yang mendorong perusahaan untuk mena'ati peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh lembaga yang terkait dengan seluk beluk mekanisme pasar modal. Hal ini terbukti jelas bahwa dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu terikat akan banyaknya peraturan-peraturan yaitu lembaga yang bukan BUMN dan BANK ini, mempunyai tingkat transparansi atau luas indeks pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaannya lebih sedikit dibanding perusahaan-perusahaan BUMN dan BANK.

- **Adanya Pengaruh Signifikan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.**

Pengujian hipotesis kelima penelitian ini dilakukan dengan menggunakan formulasi hipotesis sebagai berikut :

$H_{06} : t_{hitung} < t_{tabel} : \text{Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.}$

$H_{a6} : t_{hitung} > t_{tabel} : \text{Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.}$

Kriteria pengujian yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis (H_{a6}) di atas adalah : jika nilai t hitung Profitabilitas lebih besar dari nilai t tabelnya, maka H_{a6} diterima, yang berarti Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan. Begitu juga sebaliknya, jika nilai t hitung Profitabilitas lebih kecil dari nilai t tabelnya, maka H_{a6} ditolak, yang berarti Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.

Hasil penelitian didapat bahwa nilai t hitung Profitabilitas adalah sebesar 2,074. Sedangkan nilai t tabel dari sampel pada penelitian ini adalah sebesar 2,000. Hal tersebut berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,074 > 2,000$), sehingga H_{06} ditolak dan H_{a6} diterima. Hal ini juga dapat dilihat dengan *p-value* sebesar 0,042 memiliki nilai yang lebih kecil atau signifikan pada tingkat 0,05 ($0,042 < 0,05$). Artinya, Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan. Semakin besar tingkatan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, semakin luas pula tingkat pengungkapan informasi yang dilaporkan oleh

perusahaan tersebut. Demikian juga dengan sebaliknya, semakin kecil tingkatan Profitabilitas perusahaan, semakin mendorong atau mempengaruhi perusahaan untuk menutup-nutupi atau mengurangi kandungan informasi yang dilaporkan dan dipublikasi dalam laporan tahunan pada perusahaan tersebut.

Hal ini sejalan dengan makna profitabilitas itu sendiri bagi perusahaan, yaitu karena dengan adanya kemampuan yang tinggi pada perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap pengelolaan modalnya, akan menarik minat para investor untuk menanamkan sahamnya ke perusahaan tersebut, dan karena laba yang besar merupakan lambang kesuksesan bagi kinerja perusahaan yang dapat mengakibatkan keleluasaan perusahaan dalam meningkatkan kandungan dan kualitas informasi yang dilaporkannya.

- **Adanya Pengaruh Signifikan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.**

Pengujian hipotesis keenam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan formulasi hipotesis sebagai berikut :

$H_{07} : t_{hitung} < t_{tabel} : \text{Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.}$

$H_{a7} : t_{hitung} > t_{tabel} : \text{Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.}$

Kriteria pengujian yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis (H_{a7}) di atas adalah : jika nilai t_{hitung} Ukuran Perusahaan (SIZE) lebih besar dari nilai t_{tabel} nya, maka H_{a7} diterima, yang berarti Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan. Begitu

juga dengan sebaliknya, jika nilai t hitung Ukuran Perusahaan (SIZE) lebih kecil dari nilai t tabelnya, maka H_{a7} ditolak, yang berarti Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan.

Hasil penelitian didapat bahwa nilai t hitung Ukuran Perusahaan adalah sebesar 0,714. Sedangkan nilai t tabel dari pada penelitian ini adalah sebesar 2,000. Hal tersebut berarti t hitung $< t$ tabel ($0,714 < 2,000$), Selain hal tersebut, dapat dilihat pula bahwa p -value sebesar 0,478 jauh pada tingkat signifikansi 0,05 ($0,478 > 0,05$), sehingga H_{07} diterima dan H_{a7} ditolak. Artinya, jumlah asset yang dimiliki oleh perusahaan yang dijadikan ukuran untuk menilai Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan tersebut. Semakin banyak jumlah asset yang dimiliki atau dikelola oleh perusahaan tersebut, semakin kecil tingkat pengungkapan atau tingkat transparansi yang dilaporkan oleh perusahaan tersebut.

Hal ini bertentangan dengan konsep ukuran perusahaan itu sendiri, yaitu perusahaan yang berukuran besar, cenderung mendapat pengawasan dari masyarakat atau memiliki *public demand* yang tinggi akan informasi, serta lebih banyak mengeluarkan *cost* (biaya) dalam kegiatan operasionalnya, sehingga mendorong perusahaan tersebut untuk memberikan informasi-informasi yang lebih luas akan hasil dari kegiatan-kegiatan operasional perusahaan yang dicapainya.

B. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Pengujian secara simultan (uji F) ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel independen (Proporsi Komisaris Independen,

Ukuran Dewan Direksi, Stuktur Kepemilikan Publik, Komite Audit, Faktor Regulasi, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan) terhadap variabel dependennya yaitu Indeks Pengungkapan Informasi Perusahaan.

Pengaruh secara simlultan variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.8
Uji Simultan
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.147	7	.021	5.771	.000 ^a
	Residual	.218	60	.004		
	Total	.365	67			

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Struktur Kepemilikan Publik, Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Regulasi, Ukuran Dewan Direksi

b. Dependent Variable: Indeks Pengungkapan

Sumber : Data Olahan SPSS

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 5,771 dengan *p-value* sebesar 0,000. Hasil tersebut menyatakan bahwa *p-value* merupakan signifikan pada tingkat 0,05 atau $0,000 < 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Selain dengan melihat tingkat signifikan *p-value* dibawah 0,05 tersebut, penentuan menggunakan perbandingan F tabel pun menunjukkan bahwa nilai F hitung yaitu sebesar 5,771 lebih besar dibandingkan dengan F tabel yang telah ditentukan yaitu sebesar 2,167 ($F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen yaitu Mekanisme *Good Corporate Governance* berupa Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, Komite Audit, serta Struktur Kepemilikan Publik, Regulasi, Profitabilitas, dan Ukuran

Perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pengungkapan Informasi Perusahaan.

C. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Hasil analisis data untuk koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah :

Tabel IV.9
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.634 ^a	.402	.333	.0603348	1.392

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Struktur Kepemilikan Publik, Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Regulasi, Ukuran Dewan Direksi

b. Dependent Variable: Indeks Pengungkapan

Sumber : Data Olahan SPSS

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa nilai dari R^2 (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,333. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 33,3 % variabel Indeks Pengungkapan dapat dijelaskan oleh variabel independennya yaitu Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* yang diukur dengan Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, Komite Audit, serta Struktur Kepemilikan Publik, Faktor Regulasi, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan. Sedangkan sisanya sebesar 66,7%, menyatakan bahwa indeks atau tingkat pengungkapan informasi dijelaskan oleh faktor-faktor diluar variabel-variabel independen dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini maka dalam bab ini penulis sajikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran. Kesimpulan, keterbatasan dan saran yang disampaikan dalam bab ini seluruhnya didasarkan pada hasil analisis data dan pengujian hipotesis. Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kesimpulan :

- a) Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa Proporsi Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan. Hasil regresi terhadap hipotesis pertama tersebut menyatakan bahwa Penerapan Praktik *Good Corporate Governane* melalui Proporsi Komisaris Independen menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan informasi perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh *p-value* yang mempunyai nilai jauh diatas tingkat signifikansi sebesar 0,05 yaitu 0,758 ($0,758 > 0,05$). Selain itu, nilai *t* tabel variabel ini juga menunjukkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan *t* hitungnya. *T* hitung yang memiliki nilai $0,310 < t$ tabel sebesar 2,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Proporsi Komisaris Independen yang merupakan salah satu syarat penerapan Praktik *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan

Informasi yang diukur dengan Indeks Pengungkapan terhadap laporan tahunan perusahaan.

- b) Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa Ukuran Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan. Hasil regresi secara parsial terhadap hipotesis kedua tersebut menyatakan bahwa Ukuran Dewan Direksi yang menjadi salah satu Penerapan Praktik terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi perusahaan yang diukur dengan Indeks Pengungkapan terhadap laporan tahunan perusahaan tersebut. Hal ini dapat dijelaskan dengan hasil regresi yang menunjukkan nilai *p-value* variabel Ukuran Dewan direksi sebesar 0,127 lebih besar pada tingkat signifikan sebesar 0,05 atau $p\text{-value} > 0,05$. Selain nilai *p-value* yang tidak signifikan pada tingkat 0,05 tersebut, perhitungan dengan melihat perbandingan antara *t* tabel dan *t* hitung juga menunjukkan hal yang demikian. *T* hitung sebesar -1,547 jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai *t* tabel sebesar 2,000. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ukuran Dewan Direksi yang menjadi salah satu praktik dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi yang diukur dengan Indeks Pengungkapan Informasi terhadap laporan tahunan pada perusahaan tersebut.
- c) Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa Keberadaan Komite Audit berpengaruh Signifikan terhadap Penungkapan Informasi

Perusahaan. Hasil regresi parsial terhadap hipotesis ketiga tersebut menyatakan bahwa Keberadaan Komite Audit yang menjadi salah satu Penerapan Praktik terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pengungkapan Informasi pada perusahaan. Hasil regresi dibuktikan dengan *p-value* Komite Audit ini berada pada signifikansi 0,05 yaitu sebesar 0,029 ($0,029 < 0,05$). Hal ini didukung oleh perolehan nilai *t* hitung yang berada diatas nilai *t* tabel yaitu sebesar 2,230 dengan *t* tabel sebesar 2,000 ($t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$), sehingga dapat disimpulkan bahwa Keberadaan Komite Audit pada perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pengungkapan Informasi pada laporan tahunan perusahaan tersebut.

- d) Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa Struktur Kepemilikan Publik berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan. Hasil regresi secara parsial terhadap hipotesis keempat tersebut menyatakan bahwa Struktur Kepemilikan Publik pada perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi pada perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil regresi parsialnya yaitu perolehan *p-value* sebesar 0,251 jauh lebih besar diatas tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($0,251 > 0,05$) atau *p-value* tidak signifikan pada tingkat 0,05. Selain itu, nilai *t* hitung sebesar 1,158 jauh lebih kecil dibandingkan dengan *t* tabelnya sebesar 2,000 ($t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$), sehingga dapat disimpulkan bahwa Struktur Kepemilikan Publik yang tinggi dalam perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap

tingkat pengungkapan informasi yang diukur dengan Indeks Pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan tersebut.

- e) Hipotesis kelima dalam penelitian ini menyatakan bahwa Faktor Regulasi berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan. Hasil regresi secara parsial terhadap hipotesis kelima tersebut menyatakan bahwa Faktor Regulasi berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi dalam perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh *p-value* sebesar 0,046 signifikan pada tingkat 0,05 ($0,046 < 0,05$). Selain itu, nilai *t* hitung dari variabel Regulasi inipun menunjukkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan *t* hitungnya sebesar 2,000 yaitu sebesar 2,035 (*t* hitung $2,035 > t$ tabel 2,000). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa adanya Faktor Regulasi pada perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi yang diukur dengan Indeks Pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan.
- f) Hipotesis keenam dalam penelitian ini menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan. Hasil regresi secara parsial terhadap hipotesis keenam tersebut menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi dalam perusahaan tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh *p-value* sebesar 0,042 berada dibawah tingkat signifikan 0,05 ($0,042 < 0,05$) atau signifikan pada tingkat 0,05. Selain itu, nilai *t* hitung terhadap variabel inipun menunjukkan nilai yang lebih besar dibandingkan dari nilai *t* tabelnya sebesar 2,000 yaitu 2,074 (*t* hitung $> t$ tabel). Hal ini dapat

disimpulkan bahwa adanya tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi yang diukur dengan Indeks Pengungkapan pada laporan tahunan pada perusahaan tersebut.

- g) Hipotesis ketujuh dalam penelitian ini menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan. Hasil regresi secara parsial terhadap hipotesis ketujuh tersebut menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan yang merupakan besaran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi perusahaan yang diukur dengan Indeks Pengungkapan terhadap laporan tahunan perusahaan tersebut. Hal ini dapat dilihat hasil regresi parsialnya yang menunjukkan *p-value* variabel Ukuran Perusahaan ini sebesar 0,478 jauh lebih besar dari tingkat signifikan sebesar 0,05 atau *p-value* $> 0,05$. Selain nilai *p-value* lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansinya, perhitungan dengan perbandingan antara *t* tabel dan *t* hitung juga menunjukkan hal yang demikian. *T* hitung sebesar 0,714 jauh lebih kecil dibandingkan dengan *t* tabel sebesar 2,000 (*t* hitung $< t$ tabel). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan yang merupakan besaran perusahaan yang diukur terhadap total asset perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi yang diukur dengan Indeks Pengungkapan terhadap laporan tahunan pada perusahaan tersebut.

h) Hasil Regresi secara simultan menyatakan bahwa Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* yang diukur dengan Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, Keberadaan Komite Audit, serta Struktur Kepemilikan Publik, Faktor Regulasi, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Perusahaan yang diukur dengan Indeks Pengungkapan terhadap laporan tahunan perusahaan tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh hasil regresi secara simultan bahwa *p-value* signifikan pada tingkat 0,05 yaitu sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$), serta *t* hitung sebesar 5,771 jauh lebih besar dibandingkan dengan *t* tabel yaitu sebesar 2,167 (*t* hitung > *t* tabel). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, Keberadaan Komite Audit, Struktur Kepemilikan Publik, Faktor Regulasi, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pengungkapan Informasi perusahaan yang merupakan variabel dependennya.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang harus diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya, diantaranya adalah :

- a. Jumlah sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan LQ 45 yang terdaftar berturut-turut selama 4 tahun. Jadi, hal ini mengakibatkan sampel menjadi sedikit. Untuk

penelitian selanjutnya, dapat menambah sampel penelitian agar hasil dapat mendekati akurasi yang tinggi terhadap variabel yang diuji.

- b. Nilai *Durbin-Watson d statistic* untuk model regresi terletak pada daerah tanpa kesimpulan. Namun, peneliti tetap melanjutkan kepada tahap selanjutnya yaitu uji hipotesis, dengan kurang teratasinya masalah autokorelasi dalam model regresi tersebut, maka hasil penelitian menjadi kurang kuat.

3. Saran

- a. Bagi investor

Bagi para investor yang akan melakukan investasi dananya ke dalam perusahaan *go public* yang menerapkan GCG, hendaknya memilih perusahaan-perusahaan memiliki tingkat transparansi yang tinggi, karena dengan adanya transparansi yang tinggi pada perusahaan tersebut, akan lebih menjamin hak-hak dari para investor dalam hal *return* terhadap investasi tersebut.

- b. Bagi Manajemen Perusahaan

Agar manajemen setiap perusahaan lebih memperhatikan lagi faktor-faktor yang dirasa mempengaruhi tingkat transparansi informasi pada perusahaan tersebut. Karena hal demikian akan berpengaruh terhadap kesinambungan informasi yang diterima oleh pihak yang membutuhkan. Sehingga dengan adanya upaya dalam peningkatan kualitas dan kandungan informasi dalam laporan tahunan perusahaan tersebut, akan mendorong investor untuk memilih tempat investasi yang baik bagi mereka.

c. Bagi Dunia Akademik

Hasil penelitian ini minimal dapat memberikan informasi bagi penelitian-penelitian berikutnya dan melakukan perbaikan-perbaikan tertentu terhadap penelitian ini sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih baik dan komprehensif dari hasil penelitian ini. Salah satu perbaikan yang penulis usulkan kepada peneliti lain adalah melakukan modifikasi model yaitu dengan jalan menambah variabel-variabel lain yang secara teori dapat mempengaruhi indeks pengungkapan perusahaan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*. 2002. "Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*). Jilid II "Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Melaksanakan *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan)". Diambil dari <http://www.cic-fcgi.org>.
- Khomsiyah. 2003. "Hubungan *Corporate Governance* dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Secara Simultan". *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.
- Ghozali Imam, Prof. Dr. H. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV, Semarang : Badan Usaha Penerbit Undip
- Mintara, Yunita Heryani. 2008. "Pengaruh Implementasi *Corporate Governance* terhadap pengungkapan informasi", Skripsi Sarjana. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Noviani, Aida 2006. "*Analisis pengungkapan informasi laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta*". Skripsi Sarjana. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia.
- Tjager, Nyoman, dkk.. 2003. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavanda. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Bapepam, 2002, *Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik*, Lampiran 1 Surat Edaran Ketua Bapepam No : SE-02/PM/2002, <http://www.bapepam.go.id>.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2004, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta, Salemba Empat.
- Scott, William R., 2003, *Financial Accounting Theory*, Third Edition, Prentice Hall International.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketujuh. Yogyakarta : BPFE.
- IAI, 2007, "*Standar Akuntansi Keuangan*", Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.
- Belkaoui, Ahmed Riahi, 2000, "*Accounting Theory*", Edisi pertama, diterjemahkan oleh Harjanti Widiastuti, Salemba Empat, Jakarta.
- Sutojo, Siswanto dan E John Aldrige, 2005, "*Good Corporate Governance: Tata kelola Perusahaan Yang Sehat*", PT Damar Mulia Pustaka, Jakarta.

- Yayasan Pendidikan pasar Modal Indonesia (YPPMI), 2002, *The Essence of Good Corporate Governance. Konsep dan implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*. Jakarta.
- Forum For Corporate Governance in Indonesia, 2001, “*Seri Tata Kelola (Corporate Governance)*”, Jilid II. <http://fcgi.org.id>
- Alijoyo, F. Antonius, 2002, “*Komite Audit yang Efektif: Belajar dari Kasus Enron*”, <http://www.fcgi.or.id>.
- Munawir, S, 2004, “*Analisis Laporan Keuangan*”, Liberty, Yogyakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006, “*Pedoman Umum Good Corporate Governance*”.
- Black, B.S; H. Jang; dan W. Kim. 2003. *Predicting Firms’ Corporate Governance Choices: Evidence from Korea*. Working Paper-
<http://papers.ssrn.com/abstract=428662>.
- OECD. 1999. *OECD Principles of Corporate Governance*.
- Santoso, S. 2001. *Buku Latihan SPSS: Statistik Parametrik*. PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia-Jakarta.
- Sri Sulistyanto. 2003. “*Good Corporate Governance: Bisakah Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat?*”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis-ekobis, (Online), Vol. 4, No. 1, (<http://artikel.us/sulistyanto1.html>).

Lampiran 3

Descriptive Statistic

Descriptive Statistics

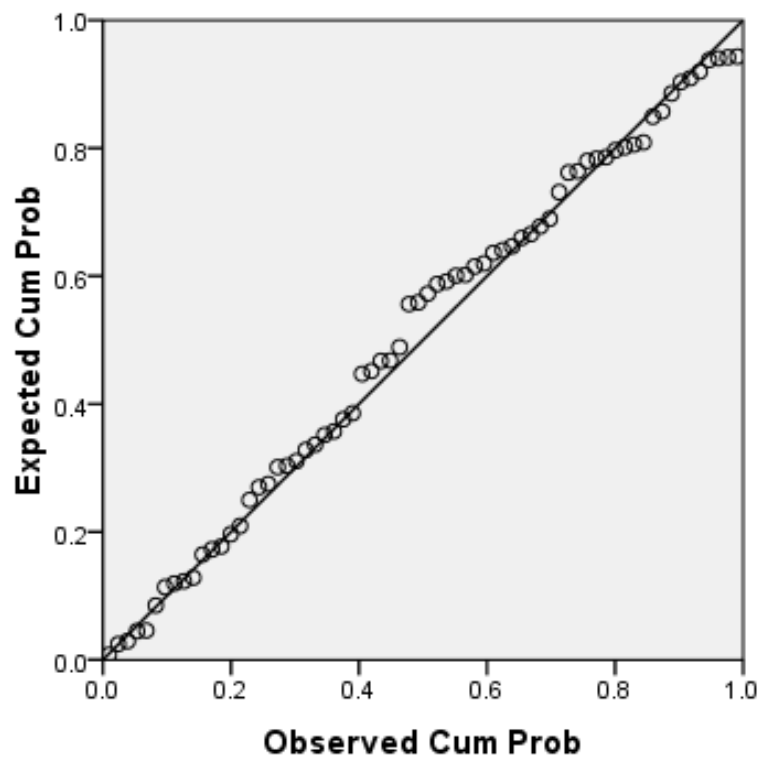
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Proporsi Komisaris Independen	68	.2000	.7500	.401765	.1072859
Ukuran Dewan Direksi	68	3	11	6.72	2.079
Komite Audit	68	2	7	3.76	1.121
Struktur Kepemilikan Publik	68	.0300	.7500	.395147	.1650825
Regulasi	68	0	1	.35	.481
Profitabilitas	68	-.2500	1.3600	.348676	.2919922
Ukuran Perusahaan	68	28.5000	33.0200	30.462794	1.1165149
Indeks Pengungkapan	68	.6000	.9100	.744412	.0738571
Valid N (listwise)	68				

Lampiran 4

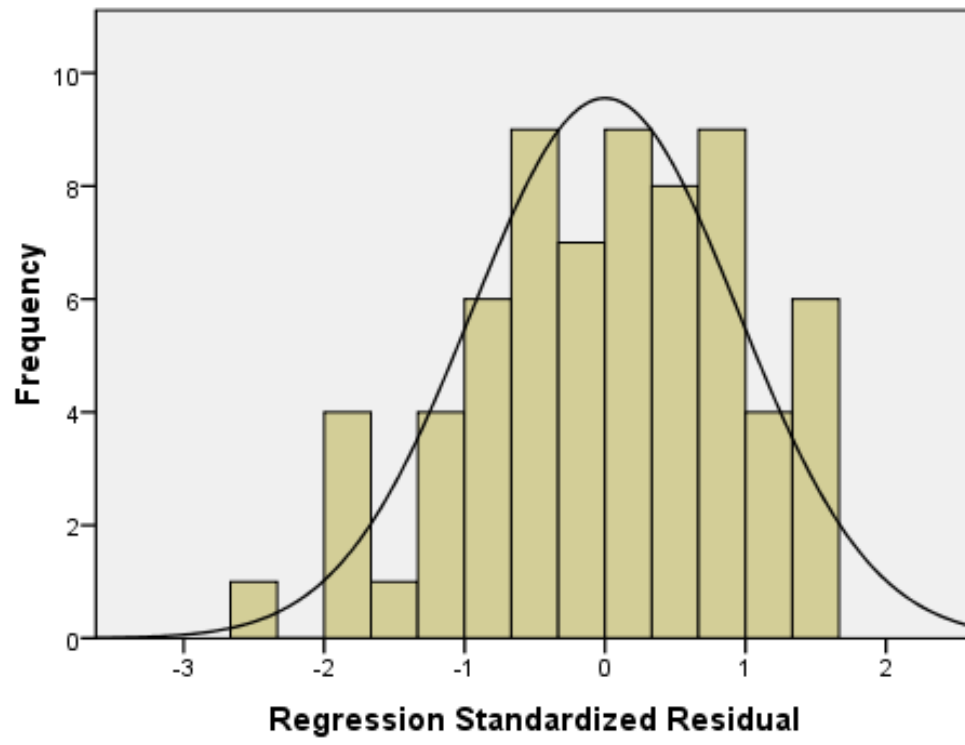
Uji Normalitas Data

- Normal Probability Plot

Dependent Variable: Indeks Pengungkapan



- Histogram



- Kolmogorov Smirnov test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		68
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05709609
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.047
	Negative	-.890
Kolmogorov-Smirnov Z		.730
Asymp. Sig. (2-tailed)		.660

a. Test distribution is Normal.

Lampiran 5

Hasil Uji Asumsi Klasik

- Uji Multikoleniaritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.489	.222		2.203	.031		
Proporsi Komisaris Independen	.025	.080	.036	.310	.758	.743	1.346
Ukuran Dewan Direksi	-.007	.005	-.198	-1.547	.127	.609	1.643
Komite Audit	.017	.008	.261	2.230	.029	.727	1.375
Struktur Kepemilikan Publik	.059	.051	.132	1.158	.251	.767	1.304
Regulasi	.037	.018	.244	2.035	.046	.691	1.447
Profitabilitas	.062	.030	.246	2.074	.042	.709	1.410
Ukuran Perusahaan	.006	.008	.084	.714	.478	.712	1.405

a. Dependent Variable: Indeks Pengungkapan

- Uji Autokolerasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.634 ^a	.402	.333	.0603348	1.392

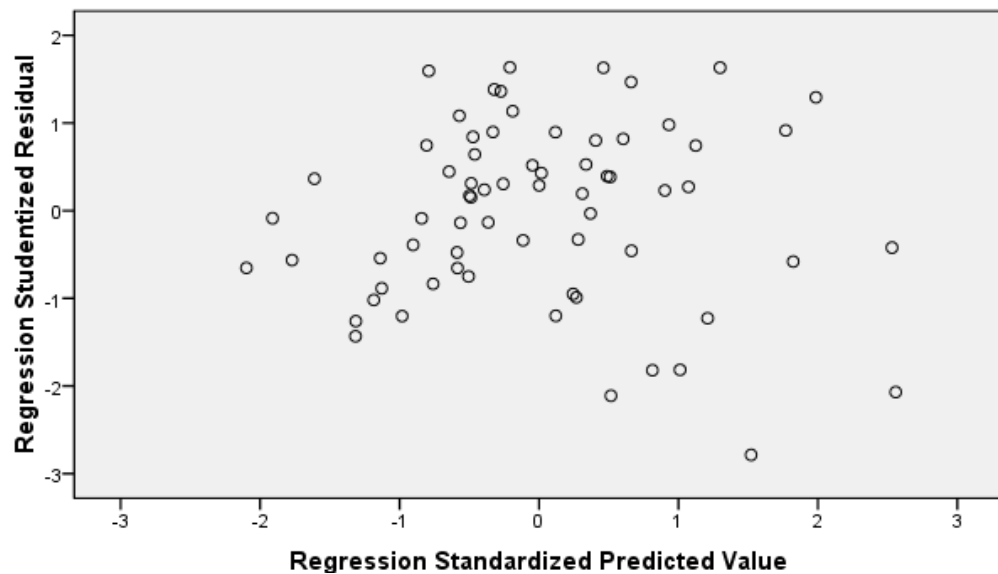
a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Struktur Kepemilikan Publik, Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Regulasi, Ukuran Dewan Direksi

b. Dependent Variable: Indeks Pengungkapan

- Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Indeks Pengungkapan



Glejser Test

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.142	.118		1.208	.232		
Proporsi Komisaris Independen	-.017	.042	-.055	-.396	.693	.743	1.346
Ukuran Dewan Direksi	-.002	.002	-.112	-.725	.471	.609	1.643
Komite Audit	.004	.004	.123	.870	.388	.727	1.375
Struktur Kepemilikan Publik	.024	.027	.121	.874	.386	.767	1.304
Regulasi	.006	.010	.087	.598	.552	.691	1.447
Profitabilitas	.017	.016	.155	1.083	.283	.709	1.410
Ukuran Perusahaan	-.004	.004	-.122	-.853	.397	.712	1.405

a. Dependent Variable: AbsUt

Lampiran 6

Hasil Uji Hipotesis

- Regresi Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.489	.222		2.203	.031		
	Proporsi Komisaris Independen	.025	.080	.036	.310	.758	.743	1.346
	Ukuran Dewan Direksi	-.007	.005	-.198	-1.547	.127	.609	1.643
	Komite Audit	.017	.008	.261	2.230	.029	.727	1.375
	Struktur Kepemilikan Publik	.059	.051	.132	1.158	.251	.767	1.304
	Regulasi	.037	.018	.244	2.035	.046	.691	1.447
	Profitabilitas	.062	.030	.246	2.074	.042	.709	1.410
	Ukuran Perusahaan	.006	.008	.084	.714	.478	.712	1.405

a. Dependent Variable: Indeks Pengungkapan

- Regresi Simultan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.147	7	.021	5.771	.000 ^a
	Residual	.218	60	.004		
	Total	.365	67			

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Struktur Kepemilikan Publik, Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Regulasi, Ukuran Dewan Direksi

b. Dependent Variable: Indeks Pengungkapan